



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, SE;
Tempat lahir : Abepura;
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/11 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pemda II Cigombong RT.007 RW.006 Kelurahan
VIM Kecamatan Abepura Kota Jayapura NIK.
917103 110191 0002;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Account Officer PT. Bank Rakyat
Indonesia Persero Cabang Sorong);
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jatir Yuda Marau, SH., CLA;
Edi Tuharea, SH; Areos B. Borolla, SH; adalah Advokat pada Kantor Hukum
(Law Office) Jatir Yuda Marau & Partners beralamat di Jalan Pandai Besi No.03
Kelurahan Tamba Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong Telp. 0813 4423
6292 Email jatiryudamarauparstners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 124/Leg.SK/HK.07/2019/PN Mnk tertanggal 27
Agustus 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan berdasarkan
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penidik Pada Kejaksaan Negeri Sorong:

- 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 29 April
2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
- 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong,
jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 27 Juni 2019;

Hal. 1 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- 1.3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

2. Penuntut Umum:

- 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari:

- 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
- 3.2. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
- 3.3. Perpanjangan penahanan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
- 3.4. Perpanjangan penahanan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura:

- 4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
- 4.2. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera

Hal. 2 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 16 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-07/T.1.13/Ft.07/2019 tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. selaku *Account Officer* atau Pejabat Prakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, bersama-sama dengan ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL (DPO) selaku Debitur dan atau Calo, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum:**

Tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan secara sadar dan sengaja memproses atau melakukan prakarsa kredit para debitur yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan kredit, dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit terhadap debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu;
- II. Memalsukan neraca keuangan atau laporan keuangan (laba/rugi) debitur;
- III. Manipulasi dan memalsukan letak lokasi tanah dalam lembar analisa kredit;
- IV. Tetap memproses permohonan kredit walaupun debitur masih terdapat pinjaman di Bank lain;
- V. Mengesampingkan pedoman pelaksanaan kredit ritel dengan tetap memproses permohonan kredit walaupun debitur tidak memiliki usaha dan dengan sengaja tidak memperhatikan persyaratan permohonan kredit seperti SUIP, TDP dan Keterangan Usaha;
- VI. Menerima sejumlah uang dan fasilitas dari debitur yang diproses;

Sehingga bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

a. Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Pasal 8 Ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 18 ayat (5)

Calon penerima KUR Ritel wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa E-KTP;

Hal. 4 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh;

“Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan”.

Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam “tata cara penilaian kualitas kredit” yang salah satunya yaitu penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur, meliputi penilaian atas perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Sehingga perbuatan Terdakwa memalsukan neraca keuangan para debitur adalah bertentangan dengan hal tersebut;

Selain itu juga terdapat aspek *profesionalisme* dan *integritas* pejabat perkreditan, yang mengharuskan semua pejabat Bank untuk menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam maupun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang *obyektif* dan *independen* serta *profesionalisme* perbankan;

Bahwa dalam Surat Keputusan ini Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Point D tentang Proses Putusan Kredit menyatakan “semua Pejabat Kredit Lini harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, serta bertanggungjawab atas kebenaran *data entry* dalam *system aplikasi* proses putusan kredit yang digunakan”;

Bahwa dalam Bab V Dokumentasi dan Administrasi Kredit Point 4 tentang Pemeriksaan Keabsahan Dokumen Kredit disebutkan Pejabat Kredit Lini bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit yang dipersyaratkan;

4. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Bab IV Kebijakan Putusan Kredit Point D angka 2 huruf h disebutkan “Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit”;

Hal. 5 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Point D angka 3 huruf b disebutkan Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui:

- 1) Kunjungan ke domisili pemohon;
- 2) Wawancara dengan pemohon;
- 3) Kunjungan ke lokasi usaha pemohon;
- 4) Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan;
- 5) Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit;
- 6) Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan;
- 7) Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.

5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel beserta perubahannya;

Persyaratan umum Calon *Debitur* adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai usaha yang produktif dan layak;
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau *investasi* dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI);
- c. Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut:

Off Farm:

Untuk kredit dengan *plafond* di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU.

6. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit.

Penilaian agunan harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggungjawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.



Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri dan memperkaya debitur atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, SALMA, JAINUDDIN, MURNI HJ, ZUKRI IRAWAN, IS LAKAJI dan SARIANA, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.4.381.441.740,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa internal dari Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura sebagaimana Surat Inspektur BRI Jayapura Nomor: R.12/KI-XVI/GRA/02/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Audit Reguler Kanca BRI Sorong Tahun 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas:
 - 1) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia), dan
 - 2) 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B (yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/masyarakat), masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh rupiah);

Serta dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 16 Maret Tahun 2007 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham lebih dari

Hal. 7 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 memiliki struktur organisasi diantaranya sebagai berikut:
 - Pemimpin Cabang : MAKBUL, S.E.
 - Manajer Pemasaran : RENO ADRIAN ZAINAL, SIP dan digantikan oleh ADETYA BOOGIE, S.P. yang membawahi Account Officer yakni:
 - (1) MARKUS JALIL;
 - (2) SELRIANUS;
 - (3) KETUT SATYA UTAMA;
 - (4) IRVAN;
 - (5) DEBORA YOSEPHA HUTAPEA;
 - (6) YUNITA EKA SARI;
 - (7) MUHAMMAD RIZA;
 - (8) ERNA OLCE MAKATUUK;
 - (9) SIGFRIT FERDINAND AMA TERON;
 - (10) EDWARD JERRY SENOBUA;
 - (11) JANSEN ALDRIN SAHETUMBAGE.
 - Petugas Administrasi Kredit (ADK) : ELVIRA MONALISA WOROTITJAN.
 - Asisten Manajer Bisnis Mikro : MAKLON SIMATUPANG.
 - Asisten Manajer Operasional : I WAYAN REDANA ATMAJA.
 - Asisten Manajer Pemasaran Dana : IRA SRI KARMILA PUARADA.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 pernah menerima permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari para debitur antara lain sebagai berikut:

No	Nama Calon Debitur	Tanggal Permohonan
1.	SARIANA	17 Maret 2017
2.	ZUKRI IRAWAN	17 Maret 2017
3.	LOUAY DARUSSALAM	22 Maret 2017
4.	RISMAN R	17 April 2017
5.	SUPARNO	17 April 2017
6.	SUDIRMAN	17 April 2017
7.	ARIF	17 April 2017
8.	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	17 April 2017
9.	JAINUDDIN	22 Mei 2017
10.	SALMA	22 Mei 2017
11.	MURNI HJ	01 Agustus 2017
12.	IS LAKAJI	01 Agustus 2017

Hal. 8 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- Bahwa seluruh permohonan tersebut semuanya kemudian disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit adalah sebagai berikut:

NO	NO REK (310-01)	NAMA DEBITUR	TGL REAL	PLAFON
1	010884104	SUDIRMAN	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
2	010891101	RISMAN R	08/05/17	Rp. 500.000.000,-
3	010885100	ARIF	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
4	010886106	SUPARNO	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
5	011053104	LOUAY DARUSSALAM	19/07/17	Rp. 500.000.000,-
6	010883108	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	04/05/17	Rp. 500.000.000,-
7	011057108	SALMA	24/07/17	Rp. 300.000.000,-
8	011058104	JAINUDDIN	24/07/17	Rp. 300.000.000,-
9	011142107	MURNI HJ	30/08/17	Rp. 125.000.000,-
10	010790101	ZUKRI IRAWAN	24/03/17	Rp. 500.000.000,-
11	011141101	IS LAKAJI	30/08/17	Rp. 200.000.000,-
12	010784100	SARIANA	24/03/17	Rp. 250.000.000,-
		TOTAL		Rp. 4.675.000.000,-

- Bahwa 11 (sebelas) *debitur* atas nama MUHAMMAD YUSUF SUBAI, SUDIRMAN, ARIF, SUPARNO, RISMAN R, LOUAY DARUSSALAM, SALMA, JAINUDDIN, SARIANA, IS LAKAJI dan MURNI HJ semuanya adalah merupakan rekomendasi dari ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL, hal tersebut diawali ketika Terdakwa meminta ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk mencari calon nasabah dengan diiming-imingi suatu proses yang cepat, serta guna memenuhi target kredit yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, selanjutnya ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL mencari dan merekomendasikan kesebelas *debitur* sebagaimana tersebut di atas termasuk dirinya kepada Terdakwa sebagai calon debitur penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa setelah permohonan kredit beserta dokumen persyaratannya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan penilaian awal (*pre screening*) untuk selanjutnya dianalisa dan evaluasi, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku *Account Officer* atau Pemrakarsa Kredit dalam melakukan prakarsa kredit dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, dengan

Hal. 9 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



tetap melakukan prakarsa kredit dan merekomendasikan pemberian putusan kredit walaupun Terdakwa mengetahui apabila para debitur tersebut tidak layak untuk diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian awal (*pre screening*) dan tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, hal itu terlihat dari terdapat 3 (tiga) debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu yakni atas nama ZUKRI IRAWAN, SARIANA dan JAINUDDIN, di mana KTP palsu para debitur sengaja dibuat oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk kelengkapan dokumen permohonan kredit, padahal ada keharusan dari Terdakwa untuk berkoordinasi dengan instansi lain guna memastikan kebenaran dokumen yang diajukan tersebut namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan analisa dan evaluasi kredit khususnya mengenai agunan, Terdakwa juga memalsukan kondisi dan lokasi agunan dalam dokumen identitas tanah milik MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, JAINUDDIN, SALMA dan SARIANA seakan-akan agunan berada pada lokasi yang layak padahal sebenarnya tidak demikian, selain itu terdapat 7 (tujuh) debitur yang lokasi agunannya tidak diketahui secara pasti dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran lokasi agunan, yakni atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MURNI HJ dan IS LAKAJI, padahal seharusnya Terdakwa harus memastikan kebenaran lokasi agunan debitur dan melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah agunan ke instansi yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan melainkan Terdakwa hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL;
- Bahwa dengan tujuan agar laporan keuangan nasabah terlihat layak sehingga permohonan kreditnya disetujui, Terdakwa juga memalsukan neraca keuangan atau laporan keuangan (laba/rugi) debitur atas nama debitur RISMAN R, SUDIRMAN, SUPARNO, ARIF, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR dan ZUKRI IRAWAN, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat analisa neraca keuangan yang sama antara satu dengan yang lainnya walaupun debitur berbeda jenis usahanya;

Hal. 10 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- Bahwa walaupun mengetahui apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikhususkan untuk para nasabah yang mempunyai usaha yang *produktif* dan layak, namun terdakwa juga dengan sengaja tidak melakukan *identifikasi* yang mendalam mengenai kebenaran usaha para debitur, sehingga terdapat 4 (empat) debitur yang usahanya tidak ada atau tidak layak namun diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni atas nama JAINUDDIN, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, LOUAY DARUSSALAM dan ARIF, bahkan Terdakwa mengetahui dan pernah meminta kepada ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk menambahkan barang dagangan ke tempat calon debitur agar terlihat usahanya layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengesampingkan persyaratan umum calon debitur dengan tetap melakukan analisa dan evaluasi kredit walaupun debitur masih memiliki pinjaman di Bank lain serta terdapat debitur yang menerima fasilitas kredit dengan plafon di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak melampirkan atau memiliki ijin usaha yang meyakinkan seperti TDP, SIUP dan SITU. Sehingga seharusnya permohonan kreditnya harus ditolak mengingat persyaratan umum calon debitur yakni “tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)”, selain itu “untuk kredit dengan plafond di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU”;
- Bahwa dari (12) kedua belas debitur di atas tidak semua permohonan kreditnya diprakarsai oleh Terdakwa, melainkan terdapat 2 (dua) debitur atas nama SALMA dan JAINUDDIN diprakarsai oleh SIGFRIT FERDINAND AMA TERON. Kedua debitur tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk diprakarsai namun dalam berkas permohonan kredit sudah terdapat catatan yang dibuat oleh Terdakwa terkait lama usaha, pendapatan, pemasok barang dagang, pelanggan dan lain-lain serta memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON yang saat itu merupakan pegawai baru untuk melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan catatan yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut, selain itu

Hal. 11 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Terdakwa juga memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk membuat analisa dan evaluasi mengenai agunan milik debitur berdasarkan gambar sketsa lokasi tanah dan foto tanah yang diberikan oleh Terdakwa dengan alasan apabila Terdakwa telah melakukan *on the spot* terhadap lokasi agunan tersebut, yang mana pada akhirnya diketahui apabila semua data yang diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar adanya;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sehubungan dengan permintaan Terdakwa kepada ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk mencari calon nasabah, dalam kenyataannya ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL memungut sejumlah uang dari hasil pencairan kredit kepada para nasabah yang jumlahnya bervariasi paling besar sejumlah 5% dari besaran *plafon* kredit, dimana selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di belakang Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL selaku calo, Terdakwa juga menerima fasilitas yang diberikan oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia untuk dipergunakan selama proses pengurusan kredit para debitur yang direkomendasikan oleh ZUKRI IRAWAN;
- Bahwa dikarenakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikurcurkan bukan kepada orang yang benar-benar layak untuk menerima kredit, mengakibatkan saat ini status kredit dalam kategori *Kolektibilitas 5* atau macet, dimana para debitur menyisahkan *siswa baki debet* yang merupakan kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong dengan uraian sebagai berikut:.

NO.	NAMA DEBITUR	BAKI DEBET
1	SUDIRMAN	Rp. 482,445,933,00
2	RISMAN R	Rp. 482,383,544,00
3	ARIF	Rp. 473,606,510,00
4	SUPARNO	Rp. 473,548,074,00
5	LOUAY DARUSSALAM	Rp. 491,222,967,00
6	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	Rp. 464,641,863,00
7	SALMA	Rp. 289,467,600,00
8	JAINUDDIN	Rp. 282,224,439,00
9	MURNI HJ	Rp. 118,370,322,00
10	ZUKRI IRAWAN	Rp. 428,076,853,00
11	IS LAKAJI	Rp. 185,831,531,00

Hal. 12 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



12	SARIANA	Rp.	209,622,104,00
	TOTAL	Rp.	4,381,441,740,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. selaku *Account Officer* atau Pejabat Prakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dins Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, bersama-sama dengan ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL (DPO) selaku Debitur dan atau Calo, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2017, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong Jalan Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan debitur atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, SALMA, JAINUDDIN, MURNI HJ, ZUKRI IRAWAN, IS LAKAJI dan SARIANA atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.4.381.441.740,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam

Hal. 13 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Laporan Hasil Pemeriksaan (*Audit*) yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa internal dari Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura sebagaimana Surat Inspektur BRI Jayapura Nomor: R.12/KI-XVI/GRA/02/2018 tanggal 24 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Audit Reguler Kanca BRI Sorong Tahun 2018;

Telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku *Account Officer* atau Pemrakarsa Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sorong, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) tanggal 30 September 2015, dengan secara sadar dan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit dari debitur yang tidak layak, tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disajikan serta tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong adalah bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang kepemilikan sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah), terbagi atas:

- 1) 1 (satu) saham seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia); dan
- 2) 299.999.999.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B (yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/masyarakat), masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,00 (lima puluh rupiah);

Serta dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 16 Maret Tahun 2007 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Hal. 14 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham lebih dari 50% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 memiliki struktur organisasi diantaranya sebagai berikut:
 - Pemimpin Cabang : MAKBUL, S.E.
 - Manajer Pemasaran : RENO ADRIAN ZAINAL, SIP dan digantikan oleh ADETYA BOOGIE, S.P. yang membawahi Account Officer yakni:
 - (1) MARKUS JALIL;
 - (2) SELRIANUS;
 - (3) KETUT SATYA UTAMA;
 - (4) IRVAN;
 - (5) DEBORA YOSEPHA HUTAPEA;
 - (6) YUNITA EKA SARI;
 - (7) MUHAMMAD RIZA;
 - (8) ERNA OLCE MAKATUUK;
 - (9) SIGFRIT FERDINAND AMA TERON;
 - (10) EDWARD JERRY SENOBUA;
 - (11) JANSEN ALDRIN SAHETUMBAGE.
 - Petugas Administrasi Kredit (ADK) : ELVIRA MONALISA WOROTITJAN.
 - Asisten Manajer Bisnis Mikro : MAKLON SIMATUPANG.
 - Asisten Manajer Operasional : I WAYAN REDANA ATMAJA.
 - Asisten Manajer Pemasaran Dana : IRA SRI KARMILA PUARADA.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong pada tahun 2017 pernah menerima permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari para debitur antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Calon Debitur	Tanggal Permohonan
1.	SARIANA	17 Maret 2017
2.	ZUKRI IRAWAN	17 Maret 2017
3.	LOUAY DARUSSALAM	22 Maret 2017
4.	RISMAN R	17 April 2017
5.	SUPARNO	17 April 2017
6.	SUDIRMAN	17 April 2017
7.	ARIF	17 April 2017
8.	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	17 April 2017
9.	JAINUDDIN	22 Mei 2017
10.	SALMA	22 Mei 2017
11.	MURNI HJ	01 Agustus 2017
12.	IS LAKAJI	01 Agustus 2017

Hal. 15 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- Bahwa seluruh permohonan tersebut semuanya kemudian disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, adapun besaran plafon kredit dan tanggal realisasi persetujuan kredit adalah sebagai berikut:

NO	NO REK (310-01)	NAMA DEBITUR	TGL REAL	PLAFON
1	010884104	SUDIRMAN	04/05/17	Rp. 500.000.000,00
2	010891101	RISMAN R	08/05/17	Rp. 500.000.000,00
3	010885100	ARIF	04/05/17	Rp. 500.000.000,00
4	010886106	SUPARNO	04/05/17	Rp. 500.000.000,00
5	011053104	LOUAY DARUSSALAM	19/07/17	Rp. 500.000.000,00
6	010883108	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	04/05/17	Rp. 500.000.000,00
7	011057108	SALMA	24/07/17	Rp. 300.000.000,00
8	011058104	JAINUDDIN	24/07/17	Rp. 300.000.000,00
9	011142107	MURNI HJ	30/08/17	Rp. 125.000.000,00
10	010790101	ZUKRI IRAWAN	24/03/17	Rp. 500.000.000,00
11	011141101	IS LAKAJI	30/08/17	Rp. 200.000.000,00
12	010784100	SARIANA	24/03/17	Rp. 250.000.000,00
		TOTAL		Rp. 4.675.000.000,00

- Bahwa 11 (sebelas) debitur atas nama MUHAMMAD YUSUF SUBAI, SUDIRMAN, ARIF, SUPARNO, RISMAN R, LOUAY DARUSSALAM, SALMA, JAINUDDIN, SARIANA, IS LAKAJI dan MURNI HJ semuanya adalah merupakan rekomendasi dari ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL, hal tersebut diawali ketika Terdakwa meminta ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk mencari calon nasabah dengan diiming-imingi suatu proses yang cepat, serta guna memenuhi target kredit yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, selanjutnya ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL mencari dan merekomendasikan 11 (kesebelas) debitur sebagaimana tersebut di atas termasuk dirinya kepada Terdakwa sebagai calon debitur penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab III Poin D, Terdakwa selaku *Account Officer* atau Pejabat Prakarsa Kredit memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Hal. 16 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- a. Menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani;
 - b. Memastikan bahwa debitur/calon debitur yang akan dilayani sudah termasuk dalam Pasar Sasaran (PS), Kriteria Resiko Yang Dapat Diterima (KRD);
 - c. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama;
 - d. Setiap pejabat pemrakarsa/penganalisa dan pengevaluasi kredit bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit (tanggung renteng);
 - e. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
 - f. Menerima dan menindaklanjuti permohonan tertulis dari debitur atas kebutuhan kreditnya;
 - g. Meyakini kebenaran data dan informasi awal yang disajikan;
 - h. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum;
 - i. Melakukan negosiasi awal dengan debitur dan melaporkan hasil negosiasi tersebut secara tertulis;
 - j. Menyajikan analisis dan evaluasi kredit sesuai dengan format yang berlaku;
 - k. Menyajikan secara tertulis risiko yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis;
 - l. Meyakini bahwa tipe, struktur dan syarat kredit yang diusulkan bersifat melindungi BRI;
 - m. Menindaklanjuti penyelesaian PPND;
 - n. Melakukan *review dokumen* yang menjadi tanggung jawabnya;
- Namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, melainkan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya tersebut dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit dengan memproses atau melakukan analisa dan evaluasi kredit dari debitur yang tidak layak, tidak meyakini kebenaran data

Hal. 17 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



dan informasi yang disajikan serta tidak meneliti dan memastikan bahwa dokumen yang mendukung putusan kredit, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian awal (*pre screening*) dan tidak meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya, hal itu terlihat dari terdapat 3 (tiga) debitur yang dokumen permohonan kreditnya palsu yakni atas nama ZUKRI IRAWAN, SARIANA dan JAINUDDIN, di mana KTP palsu para debitur sengaja dibuat oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk kelengkapan dokumen permohonan kredit, padahal ada keharusan dari Terdakwa untuk berkoordinasi dengan instansi lain guna memastikan kebenaran dokumen yang diajukan tersebut namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan analisa dan evaluasi kredit khususnya mengenai agunan, Terdakwa juga memalsukan kondisi dan lokasi agunan dalam dokumen identitas tanah milik MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, JAINUDDIN, SALMA dan SARIANA seakan-akan agunan berada pada lokasi yang layak padahal sebenarnya tidak demikian, selain itu terdapat 7 (tujuh) debitur yang lokasi agunannya tidak diketahui secara pasti dikarenakan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran lokasi agunan, yakni atas nama SUDIRMAN, RISMAN R, ARIF, SUPARNO, LOUAY DARUSSALAM, MURNI HJ dan IS LAKAJI, padahal seharusnya Terdakwa harus memastikan kebenaran lokasi agunan debitur dan melakukan pengecekan kebenaran lokasi tanah agunan ke instansi yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan melainkan Terdakwa hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL;
- Bahwa dengan tujuan agar laporan keuangan nasabah terlihat layak sehingga permohonan kreditnya disetujui, Terdakwa juga memalsukan neraca keuangan atau laporan keuangan (laba/rugi) debitur atas nama debitur RISMAN R, SUDIRMAN, SUPARNO, ARIF, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR dan ZUKRI IRAWAN, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat analisa neraca keuangan yang sama antara satu dengan yang lainnya walaupun debitur berbeda jenis usahanya;

Hal. 18 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- Bahwa walaupun mengetahui apabila Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikhususkan untuk para nasabah yang mempunyai usaha yang produktif dan layak, namun terdakwa juga dengan sengaja tidak melakukan identifikasi yang mendalam mengenai kebenaran usaha para debitur, sehingga terdapat 4 (empat) debitur yang usahanya tidak ada atau tidak layak namun diberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni atas nama JAINUDDIN, MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR, LOUAY DARUSSALAM dan ARIF, bahkan Terdakwa mengetahui dan pernah meminta kepada ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk menambahkan barang dagangan ke tempat calon debitur agar terlihat usahanya layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengesampingkan persyaratan umum calon debitur dengan tetap melakukan analisa dan evaluasi kredit walaupun debitur masih memiliki pinjaman di Bank lain serta terdapat debitur yang menerima fasilitas kredit dengan *plafon* di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak melampirkan atau memiliki ijin usaha yang meyakinkan seperti TDP, SIUP dan SITU. Sehingga seharusnya permohonan kreditnya harus ditolak mengingat persyaratan umum calon debitur yakni “tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI)”, selain itu “untuk kredit dengan plafond di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP dan SITU”;
- Bahwa dari kedua belas debitur di atas tidak semua permohonan kreditnya diprakarsai oleh Terdakwa, melainkan terdapat 2 (dua) debitur atas nama SALMA dan JAINUDDIN diprakarsai oleh SIGFRIT FERDINAND AMA TERON. Kedua debitur tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk diprakarsai namun dalam berkas permohonan kredit sudah terdapat catatan yang dibuat oleh Terdakwa terkait lama usaha, pendapatan, pemasok barang dagang, pelanggan dll serta memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON yang saat itu

Hal. 19 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



merupakan pegawai baru untuk melakukan analisa dan evaluasi berdasarkan catatan yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga memerintahkan SIGFRIT FERDINAND AMA TERON untuk membuat analisa dan evaluasi mengenai agunan milik debitur berdasarkan gambar sketsa lokasi tanah dan foto tanah yang diberikan oleh Terdakwa dengan alasan apabila Terdakwa telah melakukan *on the spot* terhadap lokasi agunan tersebut, yang mana pada akhirnya diketahui apabila semua data yang diberikan oleh Terdakwa adalah tidak benar adanya;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sehubungan dengan permintaan Terdakwa kepada ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL untuk mencari calon nasabah, dalam kenyataannya ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL memungut sejumlah uang dari hasil pencairan kredit kepada para nasabah yang jumlahnya bervariasi paling besar sejumlah 5% dari besaran plafon kredit, di mana selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di belakang Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa selain menerima sejumlah uang dari ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL selaku calo, Terdakwa juga menerima fasilitas yang diberikan oleh ZUKRI IRAWAN ALIAS DARMAWAN SYUKRIANSYAH ADIEL berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia untuk dipergunakan selama proses pengurusan kredit para debitur yang direkomendasikan oleh ZUKRI IRAWAN;
- Bahwa dikarenakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikucurkan bukan kepada orang yang benar-benar layak untuk menerima kredit, mengakibatkan saat ini status kredit dalam kategori *Kolektibilitas 5* atau macet, di mana para debitur menyisahkan sisa baki debet yang merupakan kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong dengan uraian sebagai berikut:.

NO.	NAMA DEBITUR	BAKI DEBET
1	SUDIRMAN	Rp. 482,445,933,00
2	RISMAN R	Rp. 482,383,544,00
3	ARIF	Rp. 473,606,510,00
4	SUPARNO	Rp. 473,548,074,00
5	LOUAY DARUSSALAM	Rp. 491,222,967,00
6	MUHAMMAD YUSUF SUBAIR	Rp. 464,641,863,00
7	SALMA	Rp. 289,467,600,00

Hal. 20 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



8	JAINUDDIN	Rp. 282,224,439,00
9	MURNI HJ	Rp. 118,370,322,00
10	ZUKRI IRAWAN	Rp. 428,076,853,00
11	IS LAKAJI	Rp. 185,831,531,00
12	SARIANA	Rp. 209,622,104,00
	TOTAL	Rp. 4,381,441,740,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang apa yang di dakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (*Eksepsi*) dan meminta sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDS-07/T.1.13/Ft.1/07/2019 tanggal 5 Desember 2019, yang telah dibaca dan diserahkan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Rp.4.433.835.015,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN, LOUAY DARUSSALAM dan FAISAL SYAH;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
 3. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan RISMAN R;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan ARIF;
 5. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
 6. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
 7. Fotocopy rekening koran atas nama SUPARNO;
 8. Fotocopy rekening koran atas nama ARIF;
 9. Fotocopy rekening koran atas nama MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
 10. Fotocopy rekening koran atas nama SALMA;
 11. Fotocopy rekening koran atas nama JAINUDDIN;
 12. Fotocopy rekening koran atas nama LOUAY DARUSSALAM;
 13. Fotocopy rekening koran atas nama SARIANA;
 14. Fotocopy rekening koran atas nama IS LAKAJI;
 15. Fotocopy rekening koran atas nama MURNI HJ;
 16. Fotocopy rekening koran atas nama ZUKRI IRAWAN;
 17. Fotocopy rekening koran atas nama SUDIRMAN;
 18. Fotocopy rekening koran atas nama RISMAN R;
 19. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh;

Hal. 22 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
21. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
22. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22a-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
23. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22b-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
24. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
25. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit;
26. Fotocopy Surat Wakil Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura Nomor: B.1464/KW-XVIII/SDM/02/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Penugasan Sebagai AAO Program (Kontrak) JG:5;
27. Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) beserta lampiran;
28. Fotocopy Data Individu Pekerja BRI An. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
29. Fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.47-KC-XVIII/ADK/05/2014 tanggal 01 Mei 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
30. Asli Posisi Kredit 11 (sebelas) Debitur tanggal 12 September 2018;
31. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An JAINUDDIN yang terdiri atas 2 (dua) lembar pas foto;

Hal. 23 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta) tanggal 12 Januari 2015;
2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 46 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI, S.H.,S.E.,M.Kn;
3. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. Akta 47 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI,S.H.,S.E.,M.Kn;
4. Asli Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
5. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 164/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An JAINUDDIN tanggal 24 Juli 2017;
7. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
8. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 198/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An JAINUDDIN dan FARIDAK selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
10. Asli 2 (dua) lembar Detail Monitoring An Debitur JAINUDDIN;
11. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
13. Asli Covernote Nomor 6192/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Covernote Perpanjangan Nomor: 6780/NOT/I/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor : B. 76/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Penyelesaian Proses Balik Nama dan Pengikatan Angsuran;
16. Foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;

Hal. 24 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: B.1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
19. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An Nasabah JAINUDDIN tanggal 06 Juli 2017;
22. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
23. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An JAINUDDIN dan FARIDAH;*
24. *Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia An FARIDAH dan JAINUDDIN;*
25. *Print out screen shoot BRI Checking An JAINUDDIN dan FARIDAH;*
26. Asli Surat Permohonan Kredit usaha Rakyat tanggal 22 Mei 2017 An JAINUDDIN;
27. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 An JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An JAINUDDIN;
29. Asli 14 (empat belas) Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP : B. 161/KC-XVIII/ADK/06 2017 tanggal 11 Juni 2017 An JAINUDDIN;
30. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Mei 2017 An JAINUDDIN;
31. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 24 Mei 2017 An JAINUDDIN;
32. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An JAINUDDIN;

Hal. 25 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2015 – 31 Desember 2015 An JAINUDDIN;
34. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016 An JAINUDDIN;
35. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017 An JAINUDDIN;
36. *Print out screen shoot* Pencairan BRI Checking An JAINUDDIN;
37. *Print out screen shoot* Pencairan BRI Checking An FARIDAH;
38. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
39. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
40. Asli Instruksi Pencairan Kredit Formulir 4a/IV;
41. Asli Tabel Sisa Angsuran Pinjaman;
42. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako Jainuddin;
43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN;
44. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An FARIDAH;
45. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor.+: 182.02.X.2009 An JAINUDDIN dan FARIDAH;
46. Foto copy Kartu Keluarga No. 927163101230002 tanggal 24 November 2015;
47. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An JAINUDDIN;
48. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/248/RS-SM/2017 tanggal 08 Mei 2017;
49. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/212/RS-SM/2017 tanggal 20 April 2017;
50. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU/ Tahun 2017 Nomor: 503/35/HO-BGKL/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juli 2017;
51. Foto copy Surat Izin Gangguan Dana Atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
52. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
53. Foto dokumentasi agunan Nomor SHM 602/Mariat Gunung;

Hal. 26 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
55. Asli Akta Jual Beli No: 754/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Asli Cover Note nomor: 5920/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
57. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen tanggal 10 Juli 2017 An JAINUDDIN;
58. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN dan FARIDAH;
59. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
60. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
61. Asli Gambar Situasi Tempat Usaha JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
62. Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako, Bengkel dan Parkiran Motor;
63. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;
64. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 03 April 2006;
65. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;
66. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
67. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
68. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;
69. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;
70. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;
71. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
72. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
73. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;

Hal. 27 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



74. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;
75. Asli 13 (tiga belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
76. Asli 10 (sepuluh) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode April 2017;
77. Asli 5 (lima) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode 01 Mei 2015 sd 15 Mei 2017;
32. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An LOUAY DARUSSALAM yang terdiri atas:
 1. 6 (enam) lembar pas foto;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 48 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 3. Asli Akta Pernyataan Perjanjian No. Akta 52 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 51 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 5. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 49 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 6. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 50 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 23/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 9. Asli Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 10. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 27/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 11. Asli Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
 12. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00046/2018 Kantor Pertanahan Kota Sorong;

Hal. 28 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An LOUAY DARUSSALAM tanggal 19 Juli 2017;
14. Asli 2 (dua) lembar Covernote Perpanjangan Nomor: 6781/NOT/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor: B.2934/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
16. Asli Surat Nomor: B.2804/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
17. Asli Surat Nomor: B.2640/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 06 Juli 2017 An Nasabah LOUAY DARUSSALAM;
19. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B.195/ADK/07/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Detil Monitoring An LOUAY DARUSSALAM;
21. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An LOUAY DARUSSALAM selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
22. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
23. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
24. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
26. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
27. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
28. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;

Hal. 29 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli Covernote Nomor: 6193/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
30. Foto copy 7 (tujuh) lembar Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANDI SYAFARUDDIN;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANITA SYABAN;
33. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
34. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
35. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.240.580,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
36. Asli Kwitansi sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2016;
37. Asli Kwitansi sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September 2016;
38. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen No. B. 61/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
39. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 22 Maret 2017 An LOUAY DARUSSALAM;
40. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
41. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Bank BRI Britama An LOUAY DARUSSALAM;
42. Foto copy 3 (tiga) lembar Cetakan Kode Billing An LOUAY DARUSSALAM;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;
44. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/92/KLDF-SORTIM/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;
46. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
47. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An LOUAY DARUSSALAM;

Hal. 30 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. *Print out screen shoot Debitur Checking* An LOUAY DARUSSALAM;
49. *Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur* An LOUAY DARUSSALAM;
50. *Print out screen shoot Debitur Checking* An LOUAY DARUSSALAM;
51. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An LOUAY DARUSSALAM;
52. 4 (empat) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako dan Kulbox An LOUAY DARUSSALAM;
53. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi Agunan An LOUAY DARUSSALAM;
54. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
55. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;
56. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
57. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
58. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;
59. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
60. Asli Covernote Nomor: 5940/NOT/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
61. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
62. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
63. Asli 6 (enam) lembar Laporan Penilaian Jaminan Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain Form 7a/IV tanggal Mei 2017;
64. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
65. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
66. Asli Covernote Nomor: 5921/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
67. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
68. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An LOAY DARUSSALAM;

Hal. 31 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An LOAY DARUSSALAM;
70. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating Formulir 4a/IV No. SKPP: B. 184/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 10 Juli 2017;
71. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Mei 2017;
72. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
73. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
74. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
75. Asli Kwitansi sejumlah Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
76. Asli 13 (tiga belas) lembar Kwitansi, Nota, Faktur;
77. Foto copy 36 (tiga puluh enam) lembar Kwitansi, Nota, Faktur;
33. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An RISMAN R yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 6 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 452/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2929/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Surat Nomor: B. 2808/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
 6. Asli Surat Nomor: B. 2455/CK-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
 7. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An RISMAN R tanggal 8 Mei 2017;
 8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 08 Mei 2017;

Hal. 32 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 121/ADK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017;
10. *Print out screen shoot Detil Monitoring* An RISMAN R ;
11. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An RISMAN R, S.Ip dan KURNIA MASDAR, S.KEP selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kusa tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Kwitansi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
13. Asli *Covernote* Nomor : 5891/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
14. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
15. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.153.494.895,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
16. *Print out screen shoot LN Payoff Report Printing* An RISMAN R;
17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1263/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
20. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
21. Foto copy Surat Kuasa Nomor: B. 1297-KC-XVIII/SDM/05/2017 tanggal 05 Mei 2017;
22. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Informasi Debitur* BRI An RISMAN R;
23. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
24. *Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur* An KURNIA MASDAR;
25. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
26. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;

Hal. 33 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 113/KX-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
28. Foto dokumentasi Agunan;
29. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
30. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L RISMAN R;
31. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
32. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
33. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
34. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
35. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An RISMAN R;
36. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
37. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
38. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An KURNIA MASDAR;
39. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
40. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor : 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;
41. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
42. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
43. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/011/XI/2014;
44. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor : 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2017 tanggal 04 Februari 2017;
45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
46. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An RISMAN R;

Hal. 34 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
48. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BPWTPM/2016 tanggal 31 Desember 2016;
49. Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503/23/MLK-MLMS/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
50. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;
51. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2016 tanggal 04 Februari 2016;
52. Asli Covernote Nomor: 5829/NOT/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
53. Asli Akta Jual Beli No 547/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
54. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
55. Foto copy 5 (lima) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama Kode Buku 25094107;
56. Foto copy 76 (tujuh puluh enam) lembar Laporan Keuangan Ewako Motor.
34. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Kredit Pinjaman (I) An SALMA yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) lembar pas foto;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 43 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
 3. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 45 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
 4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 44 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;

Hal. 35 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
6. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 628/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 134/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
9. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SALMA tanggal 24 Juli 2017;
10. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 199/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
11. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
12. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An Salma;
13. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 05 Juli 2017 An. SALMA;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
16. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 18 Juli 2017 An SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor : 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
19. Foto copy Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
21. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;

Hal. 36 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Asli Covernote Nomor: 6191/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
23. Asli Surat Nomor: B. 77/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Peningkatan Agunan;
24. Asli Covernote Nomor : 6779/NOT/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
25. Foto copy Akta Jual Beli No: 758/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
26. Foto copy Akta Jual Beli No : 757/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
27. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
28. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Februari 2014;
29. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
30. Asli 15 (lima belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 103/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 11 Juli 2017;
31. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
32. Asli Surat Nomor: B. 2933/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 Perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
33. Asli Surat Nomor: B. 2806/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (II);
34. Asli Surat Nomor: B. 2461/KC/XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (I);
35. Asli Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
36. Foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
37. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam tanggal Mei 2017;
38. Asli lembar tandatangan Instruksi Kredit Formulir 4a/IV;
39. Asli Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako An SALMA;

Hal. 37 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Putusan Penundaan Dokumen No. B. 59/KC-XVIII/ADK/07/2017;
41. Asli Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC;
42. Asli lembar tandatangan Pejabat Pemrakarsa, Pejabat Pemutus, ADK tanggal Juni 2017;
43. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
44. Asli 4 (empat) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
45. Asli 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
47. Asli Covernote Nomor : 6025/NOT/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
48. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JHONY BISI;
49. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
50. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;
51. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
52. Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
53. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;
54. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
55. Asli Covernote Nomor: 5919/NOT/VI/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Foto dokumentasi Tempat Usaha An SALMA;
57. Asli Gambar Situasi Tempat usaha Form 7a/IV tanggal 08 Mei 2017;
58. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017;
59. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016;
60. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2015 – 31 Desember 2015;
61. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
62. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 23 Mei 2017;
63. Asli Cetakan Kode Billing An SALMA;

Hal. 38 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Asli Surat Keterangan Nomor: 5400/101/RF-SB/2017 tanggal 09 Mei 2017;
65. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
66. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
67. 2 (dua) lembar *print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
68. *Print out screen shoot BRI Checking* An Salma;
69. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271090604160008 tanggal 06 April 2016;
70. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
71. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;
72. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;
73. Foto copy Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
74. Asli Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
75. Foto copy 13 (tiga belas) lembar Kwitansi Nama Toko Sinar Rufei.
35. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MUHAMMAD YUSUF SBUAIR yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 12 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 163/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Surat Nomor: B. 2939/KC/XV/ADK/11/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 115/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
 6. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An. MUHAMMAD YUSUF SUBAIR selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
 7. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1269/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;

Hal. 39 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tanggal 03 Mei 2017;
9. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
10. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
11. Asli Surat Nomor: B. 2837/KC-XVII/ADK/11/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Pengikatan Agunan;
12. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
13. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
14. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Asli *Covernote* Nomor : 5895/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
16. Asli 2 (dua) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 02 Mei 2017;
17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1268/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
19. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
20. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
21. Foto dokumentasi Agunan;
22. Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor: R12/Br.SOK/148/2017 tanggal 25 April 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;

Hal. 40 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Asli 15 (lima belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.45/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal April 2017;
 28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;
 29. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 30. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 31. *Print out screen shoot Debitur Checking* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 32. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 35. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020305100008;
 36. Asli Surat Keterangan Ijin Usaha Nomor: 503/563/KSB-SM/2017 tanggal 04 April 2017;
 37. Asli *Covernote* Nomor : 5775/NOT/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 38. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 39. Asli Akta Jual Beli No. 551/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 41. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 42. Foto copy 100 (seratus lembar) Laporan Keuangan Kegiatan Usaha An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR berupa Kwitansi, Nota dan Faktur.
36. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUPARNO yang terdiri atas:

Hal. 41 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 9 Tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
2. Asli Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 389/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Surat Nomor: B. 2805/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
5. Asli Surat Nomor: B. 2932/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan Ketiga III;
6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI tanggal 03 Mei 2017;
7. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;
8. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 118/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SUPARNO dan RAHMAWATI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
10. Print out screen shoot Detil Monitoring An SUPARNO;
11. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Covernote Nomor: 5892/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
13. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Model: SU;
14. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1261/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli Akta Jual Beli No. 546/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;

Hal. 42 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
19. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
21. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B-114/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L SUPARNO;
23. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
24. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
25. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
28. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SUPARNO;
29. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
30. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271011911130005 tanggal 27 Maret 2017;
31. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
32. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
33. Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
34. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
35. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/5920/DISDUKCAPIL/2017 tanggal 29 Maret 2017;
36. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
37. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An RAHMAWATI;
38. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUPARNO;
39. *Print out screen shoot* BRI Checking An RAHMAWATI;
40. *Print out screen shoot* BRI Checking An SUPARNO;
41. Asli Covernote Nomor: 5822/NOT/IV/2017 tanggal 11 April 2017;

Hal. 43 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 43. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
 44. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
 45. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
 46. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
 47. 5 (lima) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha;
 48. Foto dokumentasi Agunan.
37. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUDIRMAN yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Usaha No Akta 10 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 393/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2459/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
 5. Asli Surat Nomor: B. 2931/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 6. Asli Surat Nomor: B. 2803/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan II;
 7. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SUDIRMAN;
 8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 116/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
 10. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 03 Mei 2017 An. SUDIRMAN dan SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
 11. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An SUDIRMAN;
 12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;

Hal. 44 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Covernote Nomor: 5893/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Moel: SU;
15. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1259/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An SUDIRMAN tanggal 27 April 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2017;
20. Foto copy Kartu ATM dan Buku Tabungan BRI Britama An SUDIRMAN;
21. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
23. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SUDIRMAN;
24. Asli 12 (dua belas) Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating Bo. SKPP : B. 111/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 28 April 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
29. Asli 4 (empat) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
30. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
31. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
32. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 045.2/36/KSR-SORKOT/2017 tanggal 31 Maret 2017;
33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;

Hal. 45 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUDIRMAN;
 35. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN;
 36. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271060906160008 tanggal 09 Desember 2016;
 37. Foto dokumentasi Agungan;
 38. Foto copy 18 (delapan belas) lembar nota pembelian;
 39. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
 40. *Print out screen shoot Inquiry Uker* An SUDIRMAN dan SALMA;
 41. *Print out screen shoot BRI Checking* An SALMA;
 42. *Print out screen shoot BRI Checking* An SUDIRMAN;
 43. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
 44. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
 45. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1121/85/X/2002;
 46. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 47. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN dan SALMA;
 48. *Print out screen shoot BRI Checking* An SALMA;
 49. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An SUDIRMAN;
 50. Asli 2 (dua) lembar Total Kewajiban Debitur;
 51. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Klaim Kur Ritel;
 52. Asli Pengusulan Percepatan Kolektibilitas dan Penghapus Bukuan Kredit Kredit KUR;
 53. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA dan SUDIRMAN;
 54. Asli 52 (lima puluh dua) lembar Surat Pengantar Nomor: B. 109-KC-XVIII/ADK/03/2018 tanggal Maret 2018 beserta lampiran.
38. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ARIF yang terdiri atas:
1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 437/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 11 Tanggal 03 Mei 2017;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2930/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;

Hal. 46 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Nomor: B. 2807/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
6. Asli Surat Nomor: B. 24587/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
7. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Asli Covernote Nomor: 5894/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
9. Asli Kwitansi Pencairan Kredit Modal kerja KUR (KMK-KUR) BRI An ARIF;
10. Asli Tanda Setor sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;
11. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setor sejumlah Rp20.172.082,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 25 April 2017;
12. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 117/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
13. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An ARIF dan SURIANTI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 126/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Detil Monitoring An ARIF;
18. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
19. Foto dokumentasi tempat usaha;
20. Foto dokumentasi agunan;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 02 Mei 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;

Hal. 47 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No. SKPP: B.112/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
26. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Arif;
27. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
30. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
31. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An ARIF;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURANTI dan ARIF;
33. 2 (dua) lembar *Print out sreen shoot Informasi Debitur BRI*;
34. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An ARIF dan SURIANTI;
35. *Print out screen shoot BRI Checking* An SURIANTI;
36. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Pencairan Debitur* An SURIANTI;
37. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An ARIF;
38. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF;
39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURIANTI;
40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An. ARIF;
41. Asli Surat Keterangan Nomor: 045.2/178/MLK-MLMS/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
42. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/76;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271050103160006 tanggal 07 Maret 2016 beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF dan SALMA;
44. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
45. Asli Covernote Nomor: 5828/NOT/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;

Hal. 48 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Asli Akta Jual Beli No. 548/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 47. Asli 16 (enam belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
 48. Foto copy 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota, Kwitansi, Faktur.
39. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SARIANA yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No Akta 121 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 311/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Investasi KUR Nomor: B. 60/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
 5. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
 6. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2017;
 7. Asli Covernote Nomor: 5738/NOT/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 8. *Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA*;
 9. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 899/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017;
 10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 890/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
 11. *Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA*;
 12. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SARIANA dan RUSTAM selaku Pihak Pertama dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal 23 Maret 2017;
 13. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 14. Asli Slip Penyetoran sejumlah Rp.12.508.470,00 (dua belas juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 49 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 20 Maret 2017;
16. 4 (empat) lembar foto dokumentasi tempat usaha;
17. Foto dokumentasi agunan;
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SARIANA dan RUSTAM;
19. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An SARIANA;
20. Screen shoot Pencarian Informasi Debitur An RUSTAM;
21. Asli Covernote Nomor: 5646/NOT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 Maret 2017;
23. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Maret 2017;
24. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 65/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 21 Maret 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SARIANA;
26. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Maret 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
30. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah formulir 2A/IV An SARIANA;
31. Asli Neraca dan Laporan L/R SARIANA;
32. Foto copy Surat Keterangan usaha Nomor: 503/123/RS-SM/2017 tanggal 09 Februari 2017;
33. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib pajak An SARIANA;
34. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271051510150010 tanggal 26 Januari 2017;
35. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/04/XI/1998;
36. Foto copy Pemeriksaan Obyek Pendaftaran Tanah;
37. Foto copy Sertipikat Hak Milik Bo. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
38. Foto copy 4 (empat) lembar print Buku Tabungan BRI Britama;

Hal. 50 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Foto copy 22 (dua puluh dua) lembar Nota.
40. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ZUKRI IRAWAN yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 110 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggung Nomor: 460/2017 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) KUR BRI An. ZUKRI IRAWAN Rek. No. 0310.01.010790.10.1, Nama Rek. ZUKRI IRAWAN tanggal 27 Mar 2017 Jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: 57/ADK/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;
 5. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002;
 7. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO);
 8. Asli 2 (dua) Informasi Debitu BRI tanggal cetak 3/20/2017;
 9. *Screenshot* gambar Inquiry DHN Uker Nama Zukri Irawan;
 10. 2 (dua) lembar Informasi Debitur An. Zukri Irawan yang dicetak oleh BRI tanggal 08-03-2017;
 11. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Zukri Irawan selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
 12. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Zukri Irawan yang dicetak tanggal 27/03/2017;
 13. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, tanggal 21-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp.128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan kredit;

Hal. 51 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



14. Asli 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Notaris Retna dari Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 22-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp.180.800.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kredit;
16. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 23-03-2017, kirim kepada: Zukri Irawan sebesar Rp.99.077.418,63 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah koma enam puluh tiga sen);
17. Asli Nota Dinas tanggal 27 Maret 2017 dari Account Officer, Jansen Aldrin Sahentumbage kepada Bapak Pimpinan Cabang BRI Sorong beserta lampiran;
18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dari Zukri Irawan untuk pembayaran APMK, APHT, Proses, PNBP;
19. Covernote Nomor : 5733/NOT/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
20. Surat Pengantar Nomor B.881/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 12 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Makbul (Pinca) dan Sahat Marpaung (Pgs S P B);
21. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering latter) Nomor: B.880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
22. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangani oleh Zukri Irawan;
23. Foto copy 1 (satu) lembar bukti Pelunasan Pinjaman dari Zukri Irawan Kepada Zukri Irawan Uraian OB Pelunasan Kredit YBS sebesar Rp.17.763.284,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 21-03-2017;
24. Asli Surat Nomor: R.12.BR.SPS/148/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Sarintan

Hal. 52 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widya L.S selaku Pjs.Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk KCP MMU Sorong Pasar Sentral beserta lampiran;
25. Asli Surat Pelunasan Pembiayaan dari An. Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sorong;
 26. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Zukri Irawan yang ditandatangani oleh Sahat Marpaung selaku Pjs SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 20/03/2017;
 27. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat usah dan agunan bidang tanah;
 28. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit tanggal 17 Maret 2017 dari Zukri Irawan kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
 29. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Zukri Irawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 03/2017 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Reno Adrian Zainal;
 30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/ pemohon yang dikunjungi;
 31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/ pemohon yang dikunjungi;
 32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/ pemohon yang dikunjungi;
 33. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.66/KC-XVIII/BAL/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 An. Pemohon Zukri Irawa yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Reno Adrian Zainal selaku Pejabat Pemutus;
 34. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
 35. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat

Hal. 53 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Zukri Irawan;
36. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 3208/Makbusun, tanggal ... Maret 2019 atas nama Zukri Irawan yang di paraf dan ditandatangani oleh Reno Adrian selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahuntumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Zukri Irawan selaku pemilik jaminan;
37. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Zukri Irawan;
38. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
39. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271063006160002 An. Kepala Keluarga Zukri Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 13-12-2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
40. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002 dan NPWP: 76.737.678.3-951.000 An. Zukri Irawan;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor : 517/14/KLDF/I/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;
42. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
43. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Zukri Irawan Nomor: 474/5794/DUKCAPIL/2017 dikeluarkan di Sorong pada tanggal 24-03-2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
44. Asli 1 (satu) Lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sorng Nomor: B.75/KC/XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 Perihal Surat Peringatan I/Somasi I kepada Zukri

Hal. 54 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Irawan yang ditandatangani oleh Makbul Selaku Pimpinan Cabang dan Rahmat Irjayadi selaku SPV.ADK;

45. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor: 517/14/KLDF//2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;
 46. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
 47. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3208 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong;
 48. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
 49. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 9201070403620002 An. Marthen Rumbiak;
 50. Covernote Nomor: 5427/NOT//2017, tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 51. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
 52. Foto copy 114 (seratus empat belas) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama ZUKRI IRAWAN.
41. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MURNI HJ yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 140 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Nona Murni selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;
 2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna

Hal. 55 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



- Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Nona Murni selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;
3. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
 5. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn Notaris di Sorong;
 6. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
 7. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn Notaris di Sorong;
 8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
 9. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
 10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima dari Nn. Murni Hj untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBP;
 11. Asli Covernote Nomor: 6346/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 12. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Murni Hj yang ditandatangani oleh Rahmat Irjayadi selaku SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 25/08/2017;

Hal. 56 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



13. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: 261/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
14. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Murni Hj selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
15. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangani oleh Murni Hj;
16. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Murni Hj yang dicetak tanggal 30/08/2017;
17. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. MURNI HJ Rek. No. 0310.01.011142.10.7, Nama Rek. MURNI HJ tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
18. Asli 2 (dua) lembar (BRI Checking : TOP 5 Hasil Pencairan) yang dicetak tanggal 25/08/2017, An. Murni Hj;
19. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Inquiry DHN Uker Nama Murni HJ;
20. 3 (tiga) lembar Screenshot gambar Sisten Informasi Debitur Murni HJ;
21. 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Informasi Debitur Murni HJ;
22. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking Murni HJ;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Murni Hj kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Murni HJ dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 08/2017 yang ditandatangani oleh Murni HJ, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Murni Pasar Sentral Belakang Pondok Sageri yang ditandatangani oleh Murni;
26. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat

Hal. 57 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Murni;
27. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 026/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Murni HJ yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Murni. HJ selaku pemilik jaminan;
 28. Asli 2 (dua) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 29. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 30. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.350/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Murni HJ yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
 31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Murni HJ;
 32. Asli 1 (satu) lembar foto dokumentasi Lokasi agunan yakni bidang tanah milik Murni HJ;
 33. Covernote Nomor: 6284/NOT/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 34. Covernote Nomor: 6254/NOT/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 35. Asli Akta Jual Beli No. 868/2017 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017 antara Tuan Nasri Nonci selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Nona Murni HJ selaku Pembeli (Pihak Kedua);
 36. Asli 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar Nota Penjualan, Faktur Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Murni HJ;
 37. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;

Hal. 58 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP: 81.851.488.7-951.000 An. Murni HJ;
39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
40. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271052609080006 An. Kepala Keluarga H.M. Jufri yang dikeluarkan pada tanggal 27-09-2008 dan ditandatangani oleh Kakandukcapil;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Murni HJ Nomor : 503/220/RS-SM/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 25 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan;
42. Foto Dokumentasi tempat usaha Murni HJ selaku Pemohon Kredit;
43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
44. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Murni yang dicetak tanggal 12-5-2017;
45. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian terletak di Kecamatan Mayumuk, desa klain (SP.1) dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Murni HJ kepada Nasri Nonci yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2014;
46. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
47. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) *checkliss* kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa di tandatangani oleh petugas yakni Elfira Warotitjan.
42. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An IS LAKAJI yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 138 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Is Lakaji selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;

Hal. 59 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 139 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Is Lakaji selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;
3. Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: 262/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
5. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Islakaji Herma Wati selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
6. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Is Lakaji & Ny. Herma Wati untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBK;
7. Asli Covernote Nomor : 6345/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
9. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn Notaris di Sorong;
10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. /KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
11. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Sorong;

Hal. 60 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



12. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
13. Asli Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: R12.SBZ/251/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Is Lakaji perihal Pelunasan Fasilitas Kredit atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Tabah Triyoga selaku Branch Manager;
14. Asli Surat BNI Nomor: SOR/7/0895 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Bpk Is Lakaji perihal Keterangan Lunas Kredit yang ditandatangani oleh Yeska Friadi selaku Pimpinan;
15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Is Lakaji yang ditandatangani oleh Rahmat Irijayadi selaku SPB dan Elfira selaku ADK tanggal 25/08/2017;
16. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh Is Lakaji dan Herma Wati;
17. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Is Lakaji yang dicetak tanggal 30/08/2017;
18. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Lainnya tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. IS LAKAJI Rek. No. 0310.01.056926.50.8, Nama Rek. IS LAKAJI tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) *checkliss* kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa ditandatangani oleh petugas yakni Elfira Warotitjan;
21. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 24-08-2017, kirim kepada: Is Lakaji sebesar Rp.11.014.320,76 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
22. *Loan Payoff Quotation* Nama Nasabah IS LAKAJI sebesar Rp.11.014.320,76 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);

Hal. 61 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Is Lakaji kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Is Lakaji dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 08/2017 yang ditandatangani oleh Is Lakaji, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.349/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Is Lakaji yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
26. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat yang ditandatangani oleh Is Lakaji;
27. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Is Lakaji;
28. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat agunan yakni bidang tanah milik Is Lakaji;
29. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 025/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahuntumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Is Lakaji dan Harna Wati selaku pemilik jaminan;
30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Is Lakaji;
33. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat;

Hal. 62 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor : 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;
35. Covernote Nomor: 6086/NOT/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
36. Covernote Nomor: 6285/NOT/VI/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
37. Foto copy 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjalan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Is Lakaji;
38. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor: 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;
39. Foto Dokumentasi tempat usaha Is Lakaji selaku Pemohon Kredit;
40. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di Kecamatan Mayumuk Kabupaten Sorong, dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Is Lakaji kepada Badriah H.S yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2014;
41. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
42. Foto copy Akta Jual Beli No. 756/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Retna Purbawati selaku PPAT selanjutnya Nyonya Badriah H.S selaku Penjual (pihak pertama) dengan Tuan Is Lakaji selaku Pembeli (pihak kedua);
43. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002 dan Is Lakaji NIK. 9271050606860006;
44. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Hermawati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
45. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Herma Wati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO) debitur Is Lakaji tanggal cetak 12/05/2017;

Hal. 63 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 4 (empat) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking nasabah Is Lakaji dan Herma Wati;
48. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271051803110002 An. Kepala Keluarga Is Lakaji yang dikeluarkan pada tanggal 22-11-2016 dan ditandatangani oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
49. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 169,015,IV,2010 hari Rabu Tanggal 31 Maret 2010 antara Iswadi Lakaji dengan Rismawati;
50. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP: 75.871.792.0-951.000 An. Is Lakaji;
51. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002;
52. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Is Lakaji NIK. 9271050606860006.
43. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur JAINUDDIN;
44. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MURNI HJ;
45. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur RISMAN R;
46. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ZUKRI IRAWAN;
47. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur LOUAY DASSALAM;
48. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
49. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ARIF;
50. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA;
51. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur IS LAKAJI (pihak yang dikunjungi SARIANA);
52. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA (pihak yang dikunjungi RUSTAM);
53. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama H. ZUKRI IRAWAN;
54. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama FAISAL. S;

Hal. 64 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



55. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama MUH YUSUF ZUBAIR;
56. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama SARIANA;
57. Asli catatan pengeluaran uang MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR tulisan tangan ZUKRI IRAWAN;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah melakukan Nota Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. tersebut diatas, TIDAK TERBUKTI BERSALAH secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam seluruh surat dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. dari segala Dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*) Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana keadaan semula;
4. Membankan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, selanjutnya telah pula mendengarkan tanggapan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18

Hal. 65 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima)** bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) paling lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN, LOUAY DARUSSALAM dan FAISAL SYAH;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
 3. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan RISMAN R;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan ARIF;
 5. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;

Hal. 66 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



6. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
7. Fotocopy rekening koran atas nama SUPARNO;
8. Fotocopy rekening koran atas nama ARIF;
9. Fotocopy rekening koran atas nama MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
10. Fotocopy rekening koran atas nama SALMA;
11. Fotocopy rekening koran atas nama JAINUDDIN;
12. Fotocopy rekening koran atas nama LOUAY DARUSSALAM;
13. Fotocopy rekening koran atas nama SARIANA;
14. Fotocopy rekening koran atas nama IS LAKAJI;
15. Fotocopy rekening koran atas nama MURNI HJ;
16. Fotocopy rekening koran atas nama ZUKRI IRAWAN;
17. Fotocopy rekening koran atas nama SUDIRMAN;
18. Fotocopy rekening koran atas nama RISMAN R;
19. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh;
20. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
21. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
22. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22a-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
23. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22b-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
24. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan

Hal. 67 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
25. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit;
26. Fotocopy Surat Wakil Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura Nomor: B.1464/KW-XVIII/SDM/02/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Penugasan Sebagai AAO Program (Kontrak) JG:5;
27. Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) beserta lampiran;
28. Fotocopy Data Individu Pekerja BRI An. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
29. Fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor: R.47-KC-XVIII/ADK/05/2014 tanggal 01 Mei 2014;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk keperluan lain.**
30. Asli Posisi Kredit 11 (sebelas) Debitur tanggal 12 September 2018;
31. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) **An JAINUDDIN** yang terdiri atas 2 (dua) lembar pas foto;
1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta) tanggal 12 Januari 2015;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 46 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI, S.H.,S.E.,M.Kn;
 3. Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. Akta 47 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI,S.H.,S.E.,M.Kn;
 4. Asli Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 5. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 164/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An JAINUDDIN tanggal 24 Juli 2017;
 7. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;

Hal. 68 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 198/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An JAINUDDIN dan FARIDAK selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
10. Asli 2 (dua) lembar Detail Monitoring An Debitur JAINUDDIN;
11. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
13. Asli Covernote Nomor 6192/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Covernote Perpanjangan Nomor: 6780/NOT/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor : B. 76/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Penyelesaian Proses Balik Nama dan Pengikatan Angsuran;
16. Foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;
17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
19. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An Nasabah JAINUDDIN tanggal 06 Juli 2017;
22. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
23. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An JAINUDDIN dan FARIDAH;
24. *Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur* Bank Indonesia An FARIDAH dan JAINUDDIN;
25. *Print out screen shoot BRI Checking* An JAINUDDIN dan FARIDAH;

Hal. 69 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Permohonan Kredit usaha Rakyat tanggal 22 Mei 2017
An JAINUDDIN;
27. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form
3/IV-1/4 An JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei
2017 An JAINUDDIN;
29. Asli 14 (empat belas) Memorandum Analisis dan Putusan Kredit
Non Rating No. SKPP : B. 161/KC-XVIII/ADK/06 2017 tanggal 11
Juni 2017 An JAINUDDIN;
30. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Mei
2017 An JAINUDDIN;
31. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 24 Mei
2017 An JAINUDDIN;
32. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An
JAINUDDIN;
33. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-
006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2015 – 31 Desember
2015 An JAINUDDIN;
34. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-
006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember
2016 An JAINUDDIN;
35. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-
006993-50-3 Periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017 An
JAINUDDIN;
36. *Print out screen shoot* Pencairan BRI Checking An JAINUDDIN;
37. *Print out screen shoot* Pencairan BRI Checking An FARIDAH;
38. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
39. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
40. Asli Instruksi Pencairan Kredit Formulir 4a/IV;
41. Asli Tabel Sisa Angsuran Pinjaman;
42. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako
Jainuddin;
43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN;
44. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An FARIDAH;
45. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 182.02.X.2009 An
JAINUDDIN dan FARIDAH;

Hal. 70 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Kartu Keluarga No. 927163101230002 tanggal 24 November 2015;
47. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An JAINUDDIN;
48. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/248/RS-SM/2017 tanggal 08 Mei 2017;
49. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/212/RS-SM/2017 tanggal 20 April 2017;
50. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU/ Tahun 2017 Nomor: 503/35/HO-BGKL/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 20 Juli 2017;
51. Foto copy Surat Izin Gangguan Dana Atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
52. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
53. Foto dokumentasi agunan Nomor SHM 602/Mariat Gunung;
54. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
55. Asli Akta Jual Beli No: 754/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Asli Cover Note nomor: 5920/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
57. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen tanggal 10 Juli 2017 An JAINUDDIN;
58. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN dan FARIDAH;
59. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
60. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
61. Asli Gambar Situasi Tempat Usaha JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
62. Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako, Bengkel dan Parkiran Motor;
63. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;
64. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 03 April 2006;
65. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;

Hal. 71 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
67. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
68. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;
69. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;
70. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;
71. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
72. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
73. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;
74. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;
75. Asli 13 (tiga belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
76. Asli 10 (sepuluh) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode April 2017;
77. Asli 5 (lima) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode 01 Mei 2015 sd 15 Mei 2017;
32. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An LOUAY DARUSSALAM yang terdiri atas:
 1. 6 (enam) lembar pas foto;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 48 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 3. Asli Akta Pernyataan Perjanjian No. Akta 52 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 51 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;

Hal. 72 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 49 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
6. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 50 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 23/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
9. Asli Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
10. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 27/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
11. Asli Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
12. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00046/2018 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
13. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An LOUAY DARUSSALAM tanggal 19 Juli 2017;
14. Asli 2 (dua) lembar *Covernote* Perpanjangan Nomor: 6781/NOT/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor: B.2934/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
16. Asli Surat Nomor: B.2804/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
17. Asli Surat Nomor: B.2640/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 06 Juli 2017 An Nasabah LOUAY DARUSSALAM;
19. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B.195/ADK/07/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An LOUAY DARUSSALAM;

Hal. 73 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An LOUAY DARUSSALAM selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
22. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
23. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
24. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
26. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
27. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
28. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
29. Asli Covernote Nomor: 6193/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
30. Foto copy 7 (tujuh) lembar Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANDI SYAFARUDDIN;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANITA SYABAN;
33. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
34. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
35. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.240.580,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
36. Asli Kwitansi sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2016;
37. Asli Kwitansi sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September 2016;

Hal. 74 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen No. B. 61/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
39. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 22 Maret 2017 An LOUAY DARUSSALAM;
40. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
41. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Bank BRI Britama An LOUAY DARUSSALAM;
42. Foto copy 3 (tiga) lembar Cetakan Kode Billing An LOUAY DARUSSALAM;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;
44. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 517/92/KLDF-SORTIM/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;
46. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
47. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An LOUAY DARUSSALAM;
48. Print out screen shoot Debitur Checking An LOUAY DARUSSALAM;
49. Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur An LOUAY DARUSSALAM;
50. Print out screen shoot Debitur Checking An LOUAY DARUSSALAM;
51. Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An LOUAY DARUSSALAM;
52. 4 (empat) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako dan Kulbox An LOUAY DARUSSALAM;
53. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi Agunan An LOUAY DARUSSALAM;
54. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
55. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;
56. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
57. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
58. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;

Hal. 75 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
60. Asli Covernote Nomor: 5940/NOT/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
61. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
62. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
63. Asli 6 (enam) lembar Laporan Penilaian Jaminan Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain Form 7a/IV tanggal Mei 2017;
64. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
65. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
66. Asli Covernote Nomor: 5921/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
67. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
68. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An LOAY DARUSSALAM;
69. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An LOAY DARUSSALAM;
70. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating Formulir 4a/IV No. SKPP: B. 184/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 10 Juli 2017;
71. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Mei 2017;
72. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
73. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
74. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
75. Asli Kwitansi sejumlah Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
76. Asli 13 (tiga belas) lembar Kwitansi, Nota, Faktur;
77. Foto copy 36 (tiga puluh enam) lembar Kwitansi, Nota, Faktur;

Hal. 76 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An RISMAN R yang terdiri atas:

1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 6 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 452/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Surat Nomor: B. 2929/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
5. Asli Surat Nomor: B. 2808/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
6. Asli Surat Nomor: B. 2455/CK-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
7. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An RISMAN R tanggal 8 Mei 2017;
8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 08 Mei 2017;
9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 121/ADK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017;
10. *Print out screen shoot Detil Monitoring* An RISMAN R ;
11. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An RISMAN R,S.IP dan KURNIA MASDAR, S.KEP selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kusa tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Kwitansi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
13. Asli Covernote Nomor: 5891/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
14. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
15. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.153.494.895,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
16. *Print out screen shoot LN Payoff Report Printing* An RISMAN R;

Hal. 77 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1263/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
20. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
21. Foto copy Surat Kuasa Nomor: B. 1297-KC-XVIII/SDM/05/2017 tanggal 05 Mei 2017;
22. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Informasi Debitur BRI An RISMAN R;
23. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
24. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An KURNIA MASDAR;
25. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
26. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
27. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 113/KX-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
28. Foto dokumentasi Agunan;
29. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
30. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L RISMAN R;
31. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
32. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
33. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
34. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
35. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An RISMAN R;

Hal. 78 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
37. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
38. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An KURNIA MASDAR;
39. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
40. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;
41. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
42. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
43. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/011/XI/2014;
44. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2017 tanggal 04 Februari 2017;
45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
46. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An RISMAN R;
34. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
35. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BPWTPM/2016 tanggal 31 Desember 2016;
36. Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/23/MLK-MLMS/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
37. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;
38. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2016 tanggal 04 Februari 2016;
39. Asli Covernote Nomor: 5829/NOT/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;

Hal. 79 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Asli Akta Jual Beli No 547/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
41. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
42. Foto copy 5 (lima) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama Kode Buku 25094107;
43. Foto copy 76 (tujuh puluh enam) lembar Laporan Keuangan Ewako Motor.
34. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Kredit Pinjaman (I) An SALMA yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) lembar pas foto;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 43 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
 3. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 45 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
 4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 44 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
 5. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 6. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 628/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 134/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 9. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SALMA tanggal 24 Juli 2017;
 10. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 199/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
 11. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
 12. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Detil Monitoring An Salma;

Hal. 80 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 05 Juli 2017 An. SALMA;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
16. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 18 Juli 2017 An SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
19. Foto copy Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
21. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
22. Asli Covernote Nomor: 6191/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
23. Asli Surat Nomor: B. 77/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Peningkatan Agunan;
24. Asli Covernote Nomor: 6779/NOT/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
25. Foto copy Akta Jual Beli No: 758/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
26. Foto copy Akta Jual Beli No: 757/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
27. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
28. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Februari 2014;

Hal. 81 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
30. Asli 15 (lima belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 103/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 11 Juli 2017;
31. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
32. Asli Surat Nomor: B. 2933/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 Perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
33. Asli Surat Nomor: B. 2806/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (II);
34. Asli Surat Nomor: B. 2461/KC/XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (I);
35. Asli Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
36. Foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
37. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam tanggal Mei 2017;
38. Asli lembar tandatangan Instruksi Kredit Formulir 4a/IV;
39. Asli Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako An SALMA;
40. Asli Putusan Penundaan Dokumen No. B. 59/KC-XVIII/ADK/07/2017;
41. Asli Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC;
42. Asli lembar tandatangan Pejabat Pemrakarsa, Pejabat Pemutus, ADK tanggal Juni 2017;
43. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
44. Asli 4 (empat) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
45. Asli 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
47. Asli Covernote Nomor: 6025/NOT/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
48. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JHONY BISI;

Hal. 82 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
50. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;
51. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
52. Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
53. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;
54. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
55. Asli Covernote Nomor : 5919/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Foto dokumentasi Tempat Usaha An SALMA;
57. Asli Gambar Situasi Tempat usaha Form 7a/IV tanggal 08 Mei 2017;
58. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017;
59. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016;
60. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2015 – 31 Desember 2015;
61. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
62. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 23 Mei 2017;
63. Asli Cetakan Kode Billing An SALMA;
64. Asli Surat Keterangan Nomor : 5400/101/RF-SB/2017 tanggal 09 Mei 2017;
65. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
66. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
67. 2 (dua) lembar print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
68. Print out screen shoot BRI Checking An Salma;
69. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271090604160008 tanggal 06 April 2016;
70. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
71. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;
72. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;

Hal. 83 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
74. Asli Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
75. Foto copy 13 (tiga belas) lembar Kwitansi Nama Toko Sinar Rufe;
35. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 12 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 163/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Surat Nomor: B. 2939/KC/XV/ADK/11/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 115/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
 6. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An. MUHAMMAD YUSUF SUBAIR selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
 7. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1269/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
 8. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tanggal 03 Mei 2017;
 9. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 10. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 11. Asli Surat Nomor: B. 2837/KC-XVII/ADK/11/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Pengikatan Agunan;
 12. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 13. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 84 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Asli Covernote Nomor: 5895/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
16. Asli 2 (dua) lembar *Formulir Review* Dokumen tanggal 02 Mei 2017;
17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1268/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
19. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
20. Foto dokumentasi Tempati Usaha;
21. Foto dokumentasi Agunan;
22. Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor: R12/Br.SOK/148/2017 tanggal 25 April 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;
27. Asli 15 (lima belas) lembar *Memorandum Analisis* dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP : B.45/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
30. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
31. *Print out screen shoot Debitur Checking* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
32. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;

Hal. 85 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 35. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020305100008;
 36. Asli Surat Keterangan Ijin Usaha Nomor : 503/563/KSB-SM/2017 tanggal 04 April 2017;
 37. Asli Covernote Nomor: 5775/NOT/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 38. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 39. Asli Akta Jual Beli No. 551/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 41. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 42. Foto copy 100 (seratus lembar) Laporan Keuangan Kegiatan Usaha An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR berupa Kwitansi, Nota dan Faktur.
36. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUPARNO yang terdiri atas:
1. Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 9 Tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 389/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2805/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
 5. Asli Surat Nomor: B. 2932/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan Ketiga III;
 6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI tanggal 03 Mei 2017;

Hal. 86 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;
8. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 118/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SUPARNO dan RAHMAWATI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
10. Print out screen shoot Detil Monitoring An SUPARNO;
11. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Covernote Nomor: 5892/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
13. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Model : SU;
14. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1261/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli Akta Jual Beli No. 546/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
19. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
21. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B-114/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L SUPARNO;
23. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
24. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;

Hal. 87 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
 26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
 27. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
 28. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SUPARNO;
 29. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
 30. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271011911130005 tanggal 27 Maret 2017;
 31. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
 32. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
 33. Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
 34. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
 35. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/5920/DISDUKCAPIL/2017 tanggal 29 Maret 2017;
 36. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
 37. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An RAHMAWATI;
 38. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUPARNO;
 39. *Print out screen shoot* BRI Checking An RAHMAWATI;
 40. *Print out screen shoot* BRI Checking An SUPARNO;
 41. Asli *Covernote* Nomor: 5822/NOT/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
 42. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 43. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
 44. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
 45. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
 46. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
 47. 5 (lima) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha;
 48. Foto dokumentasi Agunan.
37. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUDIRMAN yang terdiri atas:

Hal. 88 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Usaha No Akta 10 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 393/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
3. Asli Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Surat Nomor: B. 2459/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
5. Asli Surat Nomor: B. 2931/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
6. Asli Surat Nomor: B. 2803/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan II;
7. Asli 2 (dua) lembar Kwtitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SUDIRMAN;
8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 116/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
10. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 03 Mei 2017 An. SUDIRMAN dan SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
11. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An SUDIRMAN;
12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
13. Asli *Covernote* Nomor: 5893/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Moel: SU;
15. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1259/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;

Hal. 89 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An SUDIRMAN tanggal 27 April 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar *Formulir Review* Dokumen tanggal 25 April 2017;
20. Foto copy Kartu ATM dan Buku Tabungan BRI Britama An SUDIRMAN;
21. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
23. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SUDIRMAN;
24. Asli 12 (dua belas) Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating Bo. SKPP: B. 111/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 28 April 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
29. Asli 4 (empat) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
30. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
31. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
32. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 045.2/36/KSR-SORKOT/2017 tanggal 31 Maret 2017;
33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUDIRMAN;
35. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN;
36. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271060906160008 tanggal 09 Desember 2016;
37. Foto dokumentasi Agungan;
38. Foto copy 18 (delapan belas) lembar nota pembelian;
39. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
40. *Print out screen shoot Inquiry Uker* An SUDIRMAN dan SALMA;
41. *Print out screen shoot BRI Checking* An SALMA;
42. *Print out screen shoot BRI Checking* An SUDIRMAN;

Hal. 90 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
 44. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
 45. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1121/85/X/2002;
 46. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 47. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN dan SALMA;
 48. *Print out screen shoot* BRI Checking An SALMA;
 49. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An SUDIRMAN;
 50. Asli 2 (dua) lembar Total Kewajiban Debitur;
 51. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Klaim Kur Ritel;
 52. Asli Pengusulan Percepatan Kolektibilitas dan Penghapus Bukuan Kredit Kredit KUR;
 53. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA dan SUDIRMAN;
 54. Asli 52 (lima puluh dua) lembar Surat Pengantar Nomor: B. 109-KC-XVIII/ADK/03/2018 tanggal Maret 2018 beserta lampiran.
38. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ARIF yang terdiri atas:
1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 437/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 11 Tanggal 03 Mei 2017;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2930/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Surat Nomor: B. 2807/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
 6. Asli Surat Nomor: B. 24587/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
 7. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 8. Asli *Covernote* Nomor: 5894/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 9. Asli Kwitansi Pencairan Kredit Modal kerja KUR (KMK-KUR) BRI An ARIF;

Hal. 91 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli Tanda Setor sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;
11. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setor sejumlah Rp.20.172.082,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 25 April 2017;
12. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 117/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
13. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An ARIF dan SURIANTI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 126/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Detil Monitoring An ARIF;
18. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
19. Foto dokumentasi tempat usaha;
20. Foto dokumentasi agunan;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 02 Mei 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No. SKPP: B.112/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
26. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Arif;
27. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;

Hal. 92 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
30. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
31. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An ARIF;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURANTI dan ARIF;
33. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Informasi Debitur BRI;
34. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker* An ARIF dan SURIANTI;
35. *Print out screen shoot BRI Checking* An SURIANTI;
36. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Pencairan Debitur An SURIANTI;
37. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An ARIF;
38. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF;
39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURIANTI;
40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An. ARIF;
41. Asli Surat Keterangan Nomor: 045.2/178/MLK-MLMS/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
42. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/76;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271050103160006 tanggal 07 Maret 2016 beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF dan SALMA;
44. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
45. Asli Covernote Nomor: 5828/NOT/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
46. Asli Akta Jual Beli No. 548/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
47. Asli 16 (enam belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
48. Foto copy 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
39. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SARIANA yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No Akta 121 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;

Hal. 93 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 311/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Investasi KUR Nomor : B. 60/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
5. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
6. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2017;
7. Asli Covernote Nomor: 5738/NOT/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
8. Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA;
9. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 899/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017;
10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 890/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
11. Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA;
12. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SARIANA dan RUSTAM selaku Pihak Pertama dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal 23 Maret 2017;
13. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Asli Slip Penyetoran sejumlah Rp.12.508.470,00 (dua belas juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 20 Maret 2017;
16. 4 (empat) lembar foto dokumentasi tempat usaha;
17. Foto dokumentasi agunan;
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SARIANA dan RUSTAM;
19. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An SARIANA;
20. Screen shoot Pencarian Informasi Debitur An RUSTAM;
21. Asli Covernote Nomor: 5646/NOT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 Maret 2017;

Hal. 94 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Maret 2017;
24. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 65/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 21 Maret 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SARIANA;
26. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Maret 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
30. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah formulir 2A/IV An SARIANA;
31. Asli Neraca dan Laporan L/R SARIANA;
32. Foto copy Surat Keterangan usaha Nomor: 503/123/RS-SM/2017 tanggal 09 Februari 2017;
33. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib pajak An SARIANA;
34. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271051510150010 tanggal 26 Januari 2017;
35. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 078/04/XI/1998;
36. Foto copy Pemeriksaan Obyek Pendaftaran Tanah;
37. Foto copy Sertipikat Hak Milik Bo. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
38. Foto copy 4 (empat) lembar print Buku Tabungan BRI Britama;
39. Foto copy 22 (dua puluh dua) lembar Nota;
40. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ZUKRI IRAWAN yang terdiri atas :
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 110 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.KN;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggung Nomor: 460/2017 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;

Hal. 95 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) KUR BRI An. ZUKRI IRAWAN Rek. No. 0310.01.010790.10.1, Nama Rek. ZUKRI IRAWAN tanggal 27 Mar 2017 Jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: 57/ADK/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002;
7. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO);
8. Asli 2 (dua) Informasi Debitur BRI tanggal cetak 3/20/2017;
9. *Screenshot gambar Inquiry DHN Uker* Nama Zukri Irawan;
10. 2 (dua) lembar Informasi Debitur An. Zukri Irawan yang dicetak oleh BRI tanggal 08-03-2017;
11. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Zukri Irawan selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
12. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Zukri Irawan yang dicetak tanggal 27/03/2017;
13. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, tanggal 21-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp.128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kredit;
14. Asli 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Notaris Retna dari Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 22-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp180.800.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kredit;
16. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 23-03-2017, kirim kepada: Zukri Irawan sebesar Rp.99.077.418,63 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah koma enam puluh tiga sen);

Hal. 96 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



17. Asli Nota Dinas tanggal 27 Maret 2017 dari Account Officer, Jansen Aldrin Sahentumbage kepada Bapak Pimpinan Cabang BRI Sorong beserta lampiran;
18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dari Zukri Irawan untuk pembayaran APMK, APHT, Proses, PNBK;
19. Covernote Nomor: 5733/NOT/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
20. Surat Pengantar Nomor B.881/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 12 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Makbul (Pinca) dan Sahat Marpaung (Pgs S P B);
21. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering latter) Nomor: B.880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
22. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
23. Foto copy 1 (satu) lembar bukti Pelunasan Pinjaman dari Zukri Irawan Kepada Zukri Irawan Uraian OB Pelunasan Kredit YBS sebesar Rp.17.763.284,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 21-03-2017;
24. Asli Surat Nomor: R.12.BR.SPS/148/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Sarintan Widya L.S selaku Pjs.Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Sorong Pasar Sentral beserta lampiran;
25. Asli Surat Pelunasan Pembiayaan dari An. Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sorong;
26. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Zukri Irawan yang ditandatangani oleh Sahat Marpaung selaku Pjs SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 20/03/2017;
27. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat usah dan agunan bidang tanah;

Hal. 97 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit tanggal 17 Maret 2017 dari Zukri Irawan kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
29. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Zukri Irawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 03/2017 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Reno Adrian Zainal;
30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
33. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP : B.66/KC-XVIII/BAL/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 An. Pemohon Zukri Irawa yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Reno Adrian Zainal selaku Pejabat Pemutus;
34. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
35. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Zukri Irawan;
36. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 3208/Makbusun, tanggal ... Maret 2019 atas nama Zukri Irawan yang di paraf dan ditandatangani oleh Reno Adrian selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Zukri Irawan selaku pemilik jaminan;

Hal. 98 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Zukri Irawan;
38. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
39. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271063006160002 An. Kepala Keluarga Zukri Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 13-12-2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
40. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002 dan NPWP : 76.737.678.3-951.000 An. Zukri Irawan;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor : 517/14/KLDF/II/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;
42. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
43. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Zukri Irawan Nomor : 474/5794/DUKCAPIL/2017 dikeluarkan di Sorong pada tanggal 24-03-2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
44. Asli 1 (satu) Lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sorong Nomor: B.75/KC/XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 Perihal Surat Peringatan I/Somasi I kepada Zukri Irawan yang ditandatangani oleh Makbul Selaku Pimpinan Cabang dan Rahmat Irjayadi selaku SPV.ADK;
45. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor: 517/14/KLDF/II/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;

Hal. 99 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



46. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
47. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3208 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong;
48. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
49. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 9201070403620002 An. Marthen Rumbiak;
50. Covernote Nomor: 5427/NOT/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
51. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
52. Foto copy 114 (seratus empat belas) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama ZUKRI IRAWAN;
41. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MURNI HJ yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 140 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Nona Murni selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;
 2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn, antara Nona Murni selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;
 3. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;

Hal. 100 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati,S.H.,S.E.,M.Kn Notaris di Sorong;
6. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
7. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati,S.H.,S.E.,M.Kn Notaris di Sorong;
8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomo : B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
9. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Nn. Murni Hj untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBP;
11. Asli Covernote Nomor: 6346/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
12. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Murni Hj yang ditandatangani oleh Rahmat Irjayadi selaku SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 25/08/2017;
13. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : 261/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
14. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Murni Hj selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;

Hal. 101 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangani oleh Murni Hj;
16. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Murni Hj yang dicetak tanggal 30/08/2017;
17. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. MURNI HJ Rek. No. 0310.01.011142.10.7, Nama Rek. MURNI HJ tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
18. Asli 2 (dua) lembar (BRI Checking: TOP 5 Hasil Pencairan) yang dicetak tanggal 25/08/2017, An. Murni Hj;
19. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Inquiry DHN Uker Nama Murni HJ;
20. 3 (tiga) lembar Screenshot gambar Sisten Informasi Debitur Murni HJ;
21. 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Informasi Debitur Murni HJ;
22. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking Murni HJ;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Murni Hj kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Murni HJ dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 08/2017 yang ditandatangani oleh Murni HJ, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Murni Pasar Sentral Belakang Pondok Sageri yang ditandatangani oleh Murni;
26. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Murni;
27. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 026/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Murni HJ yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin

Hal. 102 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahuntumbage selaku Penilai (*Account Officer*) serta Murni. HJ selaku pemilik jaminan;
28. Asli 2 (dua) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 29. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 30. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.350/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Murni HJ yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
 31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Murni HJ;
 32. Asli 1 (satu) lembar foto dokumentasi Lokasi agunan yakni bidang tanah milik Murni HJ;
 33. Covernote Nomor: 6284/NOT/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 34. Covernote Nomor: 6254/NOT/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 35. Asli Akta Jual Beli No. 868/2017 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017 antara Tuan Nasri Nonci selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Nona Murni HJ selaku Pembeli (Pihak Kedua);
 36. Asli 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar Nota Penjualan, Faktur Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Murni HJ;
 37. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
 38. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP: 81.851.488.7-951.000 An. Murni HJ;
 39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;

Hal. 103 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271052609080006 An. Kepala Keluarga H.M. Jufri yang dikeluarkan pada tanggal 27-09-2008 dan ditandatangani oleh Kakandukcapil;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Murni HJ Nomor : 503/220/RS-SM/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 25 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan;
42. Foto Dokumentasi tempat usaha Murni HJ selaku Pemohon Kredit;
43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
44. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Murni yang dicetak tanggal 12-5-2017;
45. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian terletak di kecamatan mayumuk, desa klain (SP.1) dengan luas 10.000m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Murni HJ kepada Nasri Nonci yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2014;
46. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
47. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) checkliss kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa di tandatangani oleh petugas yakni Elfira Warotitjan.
42. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An IS LAKAJI yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 138 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Is Lakaji selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;
 2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 139 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Is Lakaji selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;

Hal. 104 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : 262/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
5. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Islakaji Herma Wati selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
6. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Is Lakaji & Ny. Herma Wati untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBP;
7. Asli Covernote Nomor: 6345/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
9. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn Notaris di Sorong;
10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. /KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
11. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati,S.H.,S.E.,M.Kn Notaris di Sorong;
12. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;

Hal. 105 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: R12.SBZ/251/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Is Lakaji perihal Pelunasan Fasilitas Kredit atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Tabah Triyoga selaku Branch Manager;
14. Asli Surat BNI Nomor: SOR/7/0895 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Bpk Is Lakaji perihal Keterangan Lunas Kredit yang ditandatangani oleh Yeska Friadi selaku Pimpinan;
15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Is Lakaji yang ditandatangani oleh Rahmat Iriyadi selaku SPB dan Elfira selaku ADK tanggal 25/08/2017;
16. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang ditandatangani oleh Is Lakaji dan Herma Wati;
17. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Is Lakaji yang dicetak tanggal 30/08/2017;
18. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Lainnya tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. IS LAKAJI Rek. No. 0310.01.056926.50.8, Nama Rek. IS LAKAJI tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) checkliss kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa ditandatangani oleh petugas yakni Elfira Warotitjan;
21. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 24-08-2017, kirim kepada: Is Lakaji sebesar Rp.11.014.320.76,00 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
22. Loan Payoff Quotation Nama Nasabah IS LAKAJI sebesar Rp.11.014.320.76,00 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Is Lakaji kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;

Hal. 106 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Is Lakaji dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 08/2017 yang ditandatangani oleh Is Lakaji, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.349/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Is Lakaji yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
26. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat yang ditandatangani oleh Is Lakaji;
27. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Is Lakaji;
28. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat agunan yakni bidang tanah milik Is Lakaji;
29. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 025/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Is Lakaji dan Harma Wati selaku pemilik jaminan;
30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Is Lakaji;
33. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor: 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;

Hal. 107 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Covernote Nomor: 6086/NOT/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
36. Covernote Nomor: 6285/NOT/VI/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
37. Foto copy 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Is Lakaji;
38. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor : 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;
39. Foto Dokumentasi tempat usaha Is Lakaji selaku Pemohon Kredit;
40. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di kecamatan mayumuk Kabupaten Sorong, dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Is Lakaji kepada Badriah H.S yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2014;
41. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
42. Foto copy Akta Jual Beli No. 756/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Retna Purbawati selaku PPAT selanjutnya Nyonya Badriah H.S selaku Penjual (pihak pertama) dengan Tuan Is Lakaji selaku Pembeli (pihak kedua);
43. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002 dan Is Lakaji NIK. 9271050606860006;
44. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Hermawati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
45. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Herma Wati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO) debitur Is Lakaji tanggal cetak 12/05/2017;
47. 4 (empat) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking nasabah Is Lakaji dan Herma Wati;
48. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271051803110002 An. Kepala Keluarga Is Lakaji yang dikeluarkan pada tanggal 22-11-2016 dan

Hal. 108 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

49. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 169,015,IV,2010 hari Rabu Tanggal 31 Maret 2010 antara Iswadi Lakaji dengan Rismawati;
50. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP : 75.871.792.0-951.000 An. Is Lakaji;
51. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002;
52. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Is Lakaji NIK. 9271050606860006;
43. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur JAINUDDIN;
44. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MURNI HJ;
45. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur RISMAN R;
46. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ZUKRI IRAWAN;
47. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur LOUAY DASSALAM;
48. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
49. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ARIF;
50. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA;
51. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur IS LAKAJI (pihak yang dikunjungi SARIANA);
52. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA (pihak yang dikunjungi RUSTAM);
53. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama H. ZUKRI IRAWAN;
54. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama FAISAL. S;
55. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama MUH YUSUF ZUBAIR;
56. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama SARIANA;
57. Asli catatan pengeluaran uang MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR tulisan tangan ZUKRI IRAWAN

Hal. 109 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk., selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk., selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk.;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/98/HK.07/1/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor: W30-U7/98/HK.07/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan

Hal. 110 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



kepada Terdakwa, menyatakan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk, bertempat di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manokwari selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 6 (enam) halaman pada dasarnya sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah salah menerapkan hukum dalam memberi putusan telah melakukan kekeliruan;
 - bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap terbuktinya Pasal 2, Jis Pasal 18, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya menurut Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 3, Jis Pasal 18, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Banding sebanyak 2 (dua) halaman pada intinya bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan, bahwa Terdakwa sangat menghargai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dan alasan Penuntut Umum juga dapat dimaklumi Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari terhadap dakwaan primair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat termasuk besarnya uang pengganti dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja selaku *Account Officer*/ Pejabat Prakarsa Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Pesero Cabang Sorong, meskipun debitur tidak memenuhi syarat tetapi tetap merekomendasikan untuk diteruskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal tersebut sangat merugikan masyarakat lainnya yang memenuhi syarat untuk mendapat bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin serta sangat merugikan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;
- besarnya uang pengganti yang menjadi tanggungjawab terdakwa Jansen Aldrin Sahentumbage, SE adalah sebesar kerugian sebagaimana berdasarkan hasil audit internal Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong sebesar Rp.4.433.835.015,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima belas rupiah), kerugian ini terjadi karena kesalahan Terdakwa, yang pada akhirnya telah memperkaya Terdakwa dan orang lain.

Hal. 112 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 2 Jis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mnk yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUBAGE, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANSEN ALDRIN SAHENTUBAGE, SE dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan

Hal. 113 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp.4.433.835.015,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima belas rupiah) paling lama satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN, LOUAY DARUSSALAM dan FAISAL SYAH;
 2. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
 3. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan RISMAN R;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZUKRI IRAWAN dan ARIF;
 5. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
 6. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Tim berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong NOKEP: 130-KC-XVIII/SDM/11/2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kredit Program (KUR) Dengan Kolektibilitas DPK & NPL Dengan AO Pemrakarsa Sdr. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
 7. Fotocopy rekening koran atas nama SUPARNO;
 8. Fotocopy rekening koran atas nama ARIF;

Hal. 114 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy rekening koran atas nama MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
10. Fotocopy rekening koran atas nama SALMA;
11. Fotocopy rekening koran atas nama JAINUDDIN;
12. Fotocopy rekening koran atas nama LOUAY DARUSSALAM;
13. Fotocopy rekening koran atas nama SARIANA;
14. Fotocopy rekening koran atas nama IS LAKAJI;
15. Fotocopy rekening koran atas nama MURNI HJ;
16. Fotocopy rekening koran atas nama ZUKRI IRAWAN;
17. Fotocopy rekening koran atas nama SUDIRMAN;
18. Fotocopy rekening koran atas nama RISMAN R;
19. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.02-DIR/ADK/01/2016 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KUP BRI) Revisi Ketujuh;
20. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.06-DIR/ADK/03/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
21. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22-DIR/ADK/08/2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
22. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22a-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
23. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.22b-DIR/ADK/08/2015 tentang Revisi Kedua Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
24. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: S.25-DIR/JBR/04/2010 tentang Penetapan Daftar Uraian Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
25. Fotocopy Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit;
26. Fotocopy Surat Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura Nomor: B.1464/KW-XVIII/SDM/02/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal Penugasan Sebagai AAO Program (Kontrak) JG:5;

Hal. 115 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jayapura NOKEP: 310-KW/XVIII/SDM/09/2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Person Grade (PG) beserta lampiran;
28. Fotocopy Data Individu Pekerja BRI An. JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE;
29. Fotocopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.47-KC-XVIII/ADK/05/2014 tanggal 01 Mei 2014;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk keperluan lain.
30. Asli Posisi Kredit 11 (sebelas) Debitur tanggal 12 September 2018;
31. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An JAINUDDIN yang terdiri atas 2 (dua) lembar pas foto;
 1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta) tanggal 12 Januari 2015;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 46 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI, S.H.,S.E.,M.Kn;
 3. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. Akta 47 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RETNA PURBAWATI, S.H.,S.E.,M.Kn;
 4. Asli Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 5. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 164/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An JAINUDDIN tanggal 24 Juli 2017;
 7. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
 8. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 198/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
 9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An JAINUDDIN dan FARIDAK selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
 10. Asli 2 (dua) lembar Detail Monitoring An Debitur JAINUDDIN;
 11. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;

Hal. 116 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
13. Asli Covernote Nomor 6192/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Covernote Perpanjangan Nomor: 6780/NOT/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor: B. 76/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 perihal Penyelesaian Proses Balik Nama dan Pengikatan Angsuran;
16. Foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;
17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
19. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1775/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An Nasabah JAINUDDIN tanggal 06 Juli 2017;
22. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1774/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
23. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An JAINUDDIN dan FARIDAH;*
24. *Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia An FARIDAH dan JAINUDDIN;*
25. *Print out screen shoot BRI Checking An JAINUDDIN dan FARIDAH;*
26. Asli Surat Permohonan Kredit usaha Rakyat tanggal 22 Mei 2017 An JAINUDDIN;
27. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 An JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An JAINUDDIN;
29. Asli 14 (empat belas) Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 161/KC-XVIII/ADK/06 2017 tanggal 11 Juni 2017 An JAINUDDIN;

Hal. 117 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 23 Mei 2017 An JAINUDDIN;
- 31.Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 24 Mei 2017 An JAINUDDIN;
- 32.Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An JAINUDDIN;
- 33.Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2015 – 31 Desember 2015 An JAINUDDIN;
- 34.Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016 An JAINUDDIN;
- 35.Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 2157-01-006993-50-3 Periode Transaksi 01 April 2017 – 30 April 2017 An JAINUDDIN;
- 36.Print out screen shoot Pencairan BRI Checking An JAINUDDIN;
- 37.Print out screen shoot Pencairan BRI Checking An FARIDAH;
- 38.Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
- 39.Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
- 40.Asli Instruksi Pencairan Kredit Formulir 4a/IV;
- 41.Asli Tabel Sisa Angsuran Pinjaman;
- 42.Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako Jainuddin;
- 43.Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN;
- 44.Foto copy Kartu Tanda Penduduk An FARIDAH;
- 45.Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 182.02.X.2009 An JAINUDDIN dan FARIDAH;
- 46.Foto copy Kartu Keluarga No. 927163101230002 tanggal 24 November 2015;
- 47.Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An JAINUDDIN;
- 48.Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/248/RS-SM/2017 tanggal 08 Mei 2017;
- 49.Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/212/RS-SM/2017 tanggal 20 April 2017;

Hal. 118 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU/ Tahun 2017 Nomor: 503/35/HO-BGKL/VII/DPMPSTSP/2017 tanggal 20 Juli 2017;
51. Foto copy Surat Izin Gangguan Dana Atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPSTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
52. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
53. Foto dokumentasi agunan Nomor SHM 602/Mariat Gunung;
54. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 602 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
55. Asli Akta Jual Beli No: 754/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Asli Cover Note nomor: 5920/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
57. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen tanggal 10 Juli 2017 An JAINUDDIN;
58. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JAINUDDIN dan FARIDAH;
59. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An FARIDAH;
60. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An JAINUDDIN;
61. Asli Gambar Situasi Tempat Usaha JAINUDDIN tanggal Mei 2017;
62. Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako, Bengkel dan Parkiran Motor;
63. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama An JAINUDDIN;
64. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 03 April 2006;
65. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;
66. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
67. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
68. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;
69. Asli Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;

Hal. 119 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



70. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 04 April 2007;
71. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 05 April 2008;
72. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 07 April 2014;
73. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 06 April 2011;
74. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha antara SILA dan JAINUDDIN tanggal 08 April 2017;
75. Asli 13 (tiga belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
76. Asli 10 (sepuluh) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode April 2017;
77. Asli 5 (lima) lembar Laporan Penjualan Bengkel Motor Afdhal Periode 01 Mei 2015 sd 15 Mei 2017;
44. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An LOUAY DARUSSALAM yang terdiri atas:
1. 6 (enam) lembar pas foto;
 2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 48 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 3. Asli Akta Pernyataan Perjanjian No. Akta 52 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 51 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 5. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 49 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 6. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 50 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 23/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;

Hal. 120 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



9. Asli Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
10. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 27/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
11. Asli Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
12. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00046/2018 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
13. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An LOUAY DARUSSALAM tanggal 19 Juli 2017;
14. Asli 2 (dua) lembar Covernote Perpanjangan Nomor : 6781/NOT/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
15. Asli Surat Nomor: B.2934/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
16. Asli Surat Nomor: B.2804/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
17. Asli Surat Nomor: B.2640/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 06 Juli 2017 An Nasabah LOUAY DARUSSALAM;
19. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B.195/ADK/07/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Detil Monitoring An LOUAY DARUSSALAM;
21. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An LOUAY DARUSSALAM selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal Juli 2017;
22. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
23. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
24. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1802/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Hal. 121 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



26. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1801/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
27. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
28. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
29. Asli Covernote Nomor: 6193/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
30. Foto copy 7 (tujuh) lembar Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/0/HO-UD/VII/BPWTPM/2017 tanggal 18 Juli 2017;
31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANDI SYAFARUDDIN;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ANITA SYABAN;
33. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
34. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
35. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.240.580,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2017;
36. Asli Kwitansi sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 27 September 2016;
37. Asli Kwitansi sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September 2016;
38. Asli 2 (dua) lembar Putusan Penundaan Dokumen No. B. 61/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal Juli 2017;
39. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 22 Maret 2017 An LOUAY DARUSSALAM;
40. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
41. Foto copy 2 (dua) lembar Buku Rekening Bank BRI Britama An LOUAY DARUSSALAM;
42. Foto copy 3 (tiga) lembar Cetakan Kode Billing An LOUAY DARUSSALAM;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;

Hal. 122 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/92/KLDF-SORTIM/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020811074310 tanggal 12 Januari 2015;
46. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An LOUAY DARUSSALAM;
47. Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An LOUAY DARUSSALAM;
48. Print out screen shoot Debitur Checking An LOUAY DARUSSALAM;
49. Print out screen shoot Sistem Informasi Debitur An LOUAY DARUSSALAM;
50. Print out screen shoot Debitur Checking An LOUAY DARUSSALAM;
51. Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An LOUAY DARUSSALAM;
52. 4 (empat) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha Dagang Sembako dan Kulbox An LOUAY DARUSSALAM;
53. 3 (tiga) lembar Foto dokumentasi Agunan An LOUAY DARUSSALAM;
54. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
55. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;
56. Asli Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
57. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2016;
58. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2017;
59. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 28 April 2015;
60. Asli Covernote Nomor : 5940/NOT/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
61. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 15 Kantor Pertanahan Kota Sorong;
62. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;
63. Asli 6 (enam) lembar Laporan Penilaian Jaminan Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain Form 7a/IV tanggal Mei 2017;
64. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal Mei 2017;

Hal. 123 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 493 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
66. Asli Covernote Nomor: 5921/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
67. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3049 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
68. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An LOAY DARUSSALAM;
69. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An LOAY DARUSSALAM;
70. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating Formulir 4a/IV No. SKPP: B. 184/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 10 Juli 2017;
71. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Mei 2017;
72. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
73. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
74. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017 An LOAY DARUSSALAM;
75. Asli Kwitansi sejumlah Rp.285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Februari 2017;
76. Asli 13 (tiga belas) lembar Kwitansi, Nota, Faktur;
77. Foto copy 36 (tiga puluh enam) lembar Kwitansi, Nota, Faktur);
45. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An RISMAN R yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 6 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 452/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;

Hal. 124 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Nomor: B. 2929/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
5. Asli Surat Nomor: B. 2808/CK-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
6. Asli Surat Nomor: B. 2455/CK-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
7. Asli 3 (tiga) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An RISMAN R tanggal 8 Mei 2017;
8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 08 Mei 2017;
9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 121/ADK/05/2017 tanggal 08 Mei 2017;
10. *Print out screen shoot Detil Monitoring An RISMAN R* ;
11. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An RISMAN R,S.IP dan KURNIA MASDAR, S.KEP selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kusa tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Kwitansi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
13. Asli Covernote Nomor: 5891/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
14. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model: SU;
15. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.153.494.895,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
16. *Print out screen shoot LN Payoff Report Printing An RISMAN R*;
17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1263/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1262/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
20. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;

Hal. 125 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Kuasa Nomor: B. 1297-KC-XVIII/SDM/05/2017 tanggal 05 Mei 2017;
22. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Informasi Debitur* BRI An RISMAN R;
23. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
24. *Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur* An KURNIA MASDAR;
25. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
26. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
27. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 113/KX-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
28. Foto dokumentasi Agunan;
29. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
30. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L RISMAN R;
31. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
32. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
33. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
34. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
35. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An RISMAN R;
36. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
37. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
38. *Print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur* An KURNIA MASDAR;
39. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
40. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;

Hal. 126 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Informasi Debitur An RISMAN R;
 42. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk An RISMAN R;
 43. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0146/011/XI/2014;
 44. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2017 tanggal 04 Februari 2017;
 45. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271021201150010 tanggal 12 Januari 2015;
 46. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An RISMAN R;
 46. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. KURNIA MASDAR dan RISMAN R;
 47. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BPWTPM/2016 tanggal 31 Desember 2016;
 48. Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503/23/MLK-MLMS/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
 49. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/04/HO-UMUM/XII/BP2TPM/2016 tanggal 15 Desember 2016;
 50. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) dan atau Izin Tempat Usaha (ITU) Tahun 2016 Nomor: 503/103/HO-UMUM/II/BP2TPM/2016 tanggal 04 Februari 2016;
 51. Asli Covernote Nomor : 5829/NOT/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 52. Asli Akta Jual Beli No 547/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 53. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 453 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 54. Foto copy 5 (lima) lembar Buku Rekening Tabungan BRI Britama Kode Buku 25094107;
 55. Foto copy 76 (tujuh puluh enam) lembar Laporan Keuangan Ewako Motor.
40. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Kredit Pinjaman (I) An SALMA yang terdiri atas:

Hal. 127 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar pas foto;
2. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Kredit Modal Kerja No. Akta 43 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
3. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 45 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
4. Asli Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. Akta 44 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT IRNAWATI NAZAR;
5. Asli Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
6. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 628/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
7. Asli Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
8. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 134/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
9. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SALMA tanggal 24 Juli 2017;
10. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor B. 199/ADK/07/2017 tanggal 24 Juli 2017;
11. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
12. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An Salma;
13. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 05 Juli 2017 An. SALMA;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
16. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 18 Juli 2017 An SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;

Hal. 128 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1777/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
18. Asli Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
19. Foto copy Surat Izin Gangguan dan atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU) Tahun 2017 Nomor: 503/259/HO-TK/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli 2017;
20. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
21. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Juli 2017;
22. Asli Covernote Nomor: 6191/NOT/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
23. Asli Surat Nomor: B. 77/KC-XVIII/ADK/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Peningkatan Agunan;
24. Asli Covernote Nomor: 6779/NOT/II/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
25. Foto copy Akta Jual Beli No: 758/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
26. Foto copy Akta Jual Beli No: 757/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
27. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2015;
28. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Februari 2014;
29. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
30. Asli 15 (lima belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 103/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 11 Juli 2017;
31. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1776/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Hal. 129 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Surat Nomor: B. 2933/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 Perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
33. Asli Surat Nomor: B. 2806/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (II);
34. Asli Surat Nomor: B. 2461/KC/XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Surat Peringatan Kedua (I);
35. Asli Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
36. Foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) tanggal 08 Mei 2017;
37. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam tanggal Mei 2017;
38. Asli lembar tandatangan Instruksi Kredit Formulir 4a/IV;
39. Asli Neraca dan Laporan R/L Dagang Sembako An SALMA;
40. Asli Putusan Penundaan Dokumen No. B. 59/KC-XVIII/ADK/07/2017;
41. Asli Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC;
42. Asli lembar tandatangan Pejabat Pemrakarsa, Pejabat Pemutus, ADK tanggal Juni 2017;
43. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
44. Asli 4 (empat) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
45. Asli 2 (dua) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal Mei 2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
47. Asli Covernote Nomor : 6025/NOT/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
48. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An JHONY BISI;
49. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 340 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
50. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;
51. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 349 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
52. Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
53. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Juni 2017;

Hal. 130 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 2 (dua) lembar Foto dokumentasi Agunan An SALMA;
55. Asli Covernote Nomor: 5919/NOT/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
56. Foto dokumentasi Tempat Usaha An SALMA;
57. Asli Gambar Situasi Tempat usaha Form 7a/IV tanggal 08 Mei 2017;
58. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Mei 2017 – 31 Mei 2017;
59. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2016 – 31 Desember 2016;
60. Asli Laporan Transaksi An SALMA periode 01 Desember 2015 – 31 Desember 2015;
61. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
62. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 23 Mei 2017;
63. Asli Cetakan Kode Billing An SALMA;
64. Asli Surat Keterangan Nomor: 5400/101/RF-SB/2017 tanggal 09 Mei 2017;
65. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
66. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
67. 2 (dua) lembar print out screen shoot Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
68. *Print out screen shoot* BRI Checking An Salma;
69. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271090604160008 tanggal 06 April 2016;
70. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SALMA;
71. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;
72. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Sewa Kontrak Rumah Toko tanggal 29 Mei 2017;
73. Foto copy Surat Peryataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
74. Asli Surat Peryataan Sewa Kontrak Rumah/Toko tanggal 28 Oktober 2014;
75. Foto copy 13 (tiga belas) lembar Kwitansi Nama Toko Sinar Rufei;

Hal. 131 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MUHAMMAD YUSUF SBUAIR yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 12 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 163/2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Surat Nomor: B. 2939/KC/XV/ADK/11/2017 tanggal 14 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 115/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
 6. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An. MUHAMMAD YUSUF SUBAIR selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
 7. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1269/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
 8. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tanggal 03 Mei 2017;
 9. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Detil Monitoring An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 10. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 11. Asli Surat Nomor: B. 2837/KC-XVII/ADK/11/2017 tanggal 07 November 2017 Perihal Penyelesaian Proses Balik nama dan Pengikatan Agunan;
 12. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
 13. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 14. Asli Kwitansi Pembayaran Sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 15. Asli Covernote Nomor: 5895/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 16. Asli 2 (dua) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 02 Mei 2017;

Hal. 132 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1268/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
19. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
20. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
21. Foto dokumentasi Agunan;
22. Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor: R12/Br.SOK/148/2017 tanggal 25 April 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;
27. Asli 15 (lima belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.45/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal April 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
30. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
31. *Print out screen shoot Debitur Checking An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;*
32. *Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;*
33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
35. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271020305100008;

Hal. 133 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Keterangan Ijin Usaha Nomor: 503/563/KSB-SM/2017 tanggal 04 April 2017;
37. Asli Covernote Nomor: 5775/NOT/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
38. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 608 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
39. Asli Akta Jual Beli No. 551/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
41. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR;
42. Foto copy 100 (seratus lembar) Laporan Keuangan Kegiatan Usaha An MUHAMMAD YUSUF SUBAIR berupa Kwitansi, Nota dan Faktur.
42. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUPARNO yang terdiri atas:
 1. Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. Akta 9 Tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 389/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2805/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
 5. Asli Surat Nomor: B. 2932/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan Ketiga III;
 6. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI tanggal 03 Mei 2017;
 7. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;
 8. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 118/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;

Hal. 134 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SUPARNO dan RAHMAWATI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
10. *Print out screen shoot Detil Monitoring* An SUPARNO;
11. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
12. Asli Covernote Nomor: 5892/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
13. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Model: SU;
14. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1261/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1260/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli Akta Jual Beli No. 546/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
19. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
20. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
21. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP : B-114/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L SUPARNO;
23. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
24. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
25. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/V1-2 tanggal April 2017;

Hal. 135 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
 28. Foto copy Buku Tabungan BRI Britama An SUPARNO;
 29. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
 30. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271011911130005 tanggal 27 Maret 2017;
 31. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
 32. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
 33. Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/53/REMUT/2017 tanggal 03 April 2017;
 34. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
 35. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/5920/DISDUKCAPIL/2017 tanggal 29 Maret 2017;
 36. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
 37. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An RAHMAWATI;
 38. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUPARNO;
 39. *Print out screen shoot BRI Checking* An RAHMAWATI;
 40. *Print out screen shoot BRI Checking* An SUPARNO;
 41. Asli Covernote Nomor: 5822/NOT/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
 42. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 629 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 43. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUPARNO;
 44. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 378/10/V/2005;
 45. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An SUPARNO;
 46. Foto copy Surat Pengambilan KTP (elektronik) An RAHMAWATI;
 47. 5 (lima) lembar Foto dokumentasi Tempat Usaha;
 48. Foto dokumentasi Agunan.
43. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SUDIRMAN yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Usaha No Akta 10 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 393/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;

Hal. 136 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Surat Nomor: B. 2459/KC-XVIII/ADK/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
5. Asli Surat Nomor: B. 2931/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
6. Asli Surat Nomor: B. 2803/KC-XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan II;
7. Asli 2 (dua) lembar Kwtitansi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR (KMK-KUR) BRI An SUDIRMAN;
8. Asli Tanda Setoran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
9. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : B. 116/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
10. Asli Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 03 Mei 2017 An. SUDIRMAN dan SALMA selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
11. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An SUDIRMAN;
12. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 03 Mei 2017;
13. Asli *Covernote* Nomor: 5893/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
14. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Moel: SU;
15. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 1259/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. Asli 4 (lembar) Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor : B. 1258/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
18. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An SUDIRMAN tanggal 27 April 2017;
19. Asli 4 (empat) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2017;
20. Foto copy Kartu ATM dan Buku Tabungan BRI Britama An SUDIRMAN;

Hal. 137 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 April 2017;
23. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SUDIRMAN;
24. Asli 12 (dua belas) Memorandum Analis dan Putusan Kredit Non Rating Bo. SKPP: B. 111/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 28 April 2017;
25. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
26. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
29. Asli 4 (empat) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV;
30. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
31. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
32. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 045.2/36/KSR-SORKOT/2017 tanggal 31 Maret 2017;
33. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA;
34. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An SUDIRMAN;
35. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN;
36. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271060906160008 tanggal 09 Desember 2016;
37. Foto dokumentasi Agungan;
38. Foto copy 18 (delapan belas) lembar nota pembelian;
39. Foto dokumentasi Tempat Usaha;
40. *Print out screen shoot Inquiry Uker* An SUDIRMAN dan SALMA;
41. *Print out screen shoot* BRI Checking An SALMA;
42. *Print out screen shoot* BRI Checking An SUDIRMAN;
43. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SALMA;
44. *Print out screen shoot* Pencarian Informasi Debitur An SUDIRMAN;
45. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1121/85/X/2002;

Hal. 138 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



46. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 710 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 47. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SUDIRMAN dan SALMA;
 48. *Print out screen shoot* BRI Checking An SALMA;
 49. Asli 2 (dua) lembar Informasi Debitur An SUDIRMAN;
 50. Asli 2 (dua) lembar Total Kewajiban Debitur;
 51. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Klaim Kur Ritel;
 52. Asli Pengusulan Percepatan Kolektibilitas dan Penghapus Bukuan Kredit Kredit KUR;
 53. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SALMA dan SUDIRMAN;
 54. Asli 52 (lima puluh dua) lembar Surat Pengantar Nomor: B. 109-KC-XVIII/ADK/03/2018 tanggal Maret 2018 beserta lampiran.
44. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ARIF yang terdiri atas:
1. Asli Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 437/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit No. Akta 11 Tanggal 03 Mei 2017;
 4. Asli Surat Nomor: B. 2930/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Surat Peringatan III/Somasi III;
 5. Asli Surat Nomor: B. 2807/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 02 November 2017 perihal Surat Peringatan Kedua (II);
 6. Asli Surat Nomor: B. 24587/KC/XVIII/ADK/11/2017 tanggal 09 Oktober 2017 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
 7. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 8. Asli Covernote Nomor: 5894/NOT/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 9. Asli Kwitansi Pencairan Kredit Modal kerja KUR (KMK-KUR) BRI An ARIF;
 10. Asli Tanda Setor sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 04 Mei 2017;

Hal. 139 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setor sejumlah Rp.20.172.082,00 (dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) tanggal 25 April 2017;
12. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: B. 117/ADK/05/2017 tanggal 04 Mei 2017;
13. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An ARIF dan SURIANTI selaku Pemberi Kuasa dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa;
14. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 126/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
15. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
16. Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 1264/KC-XVIII/ADK/05/2017 tanggal 03 Mei 2017;
17. 2 (dua) lembar *Print out screen shoot Detil Monitoring* An ARIF;
18. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
19. Foto dokumentasi tempat usaha;
20. Foto dokumentasi agunan;
21. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 27 April 2017;
22. Asli 2 (dua) lembar Formulir Review Dokumen tanggal 02 Mei 2017;
23. Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 17 April 2017;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal April 2017;
25. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit No. SKPP: B.112/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;
26. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Arif;
27. Asli 4 (empat) lembar dokumen Model 78-a tanggal April 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;

Hal. 140 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



30. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Formulir 4/IV-1/2 tanggal April 2017;
31. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah Formulir 2A/IV An ARIF;
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURANTI dan ARIF;
33. 2 (dua) lembar Print out sreen shoot Informasi Debitur BRI;
34. Print out screen shoot Inquiry DHN Uker An ARIF dan SURIANTI;
35. Print out screen shoot BRI Checking An SURIANTI;
36. 2 (dua) lembar Print out screen shoot Pencairan Debitur An SURIANTI;
37. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An ARIF;
38. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF;
39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SURIANTI;
40. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak An. ARIF;
41. Asli Surat Keterangan Nomor : 045.2/178/MLK-MLMS/IV/2017 tanggal 11 April 2017;
42. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/76;
43. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271050103160006 tanggal 07 Maret 2016 beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk An ARIF dan SALMA;
44. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 407 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
45. Asli Covernote Nomor: 5828/NOT/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
46. Asli Akta Jual Beli No. 548/2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
47. Asli 16 (enam belas) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
48. Foto copy 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota, Kwitansi, Faktur;
45. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An SARIANA yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No Akta 121 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
 2. Asli Sertipikat Hak Milik No. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;

Hal. 141 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



3. Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 311/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Investasi KUR Nomor: B. 60/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
5. Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Model : SU;
6. Asli Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2017;
7. Asli Covernote Nomor: 5738/NOT/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
8. Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA;
9. Asli Surat Pengantar Nomor: B. 899/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 13 Maret 2017;
10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor: B. 890/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
11. *Print out screen shoot Detil Monitoring An SARIANA;*
12. Asli Surat Kuasa Debet Rekening An SARIANA dan RUSTAM selaku Pihak Pertama dan MAKBUL selaku Penerima Kuasa tanggal 23 Maret 2017;
13. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
14. Asli Slip Penyetoran sejumlah Rp.12.508.470,00 (dua belas juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket tanggal 20 Maret 2017;
16. 4 (empat) lembar foto dokumentasi tempat usaha;
17. Foto dokumentasi agunan;
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An SARIANA dan RUSTAM;
19. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur An SARIANA;
20. Screen shoot Pencarian Informasi Debitur An RUSTAM;
21. Asli Covernote Nomor: 5646/NOT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris/PPAT RETNA PURBAWATI;
22. Asli Surat Permohonan Kredit Usaha tanggal 17 Maret 2017;
23. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Form 3/IV-1/4 tanggal Maret 2017;

Hal. 142 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



24. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B. 65/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 21 Maret 2017;
25. Asli 2 (dua) lembar Neraca dan Laporan R/L An SARIANA;
26. Asli 4 (empat) lembar dokumen model 78-a tanggal Maret 2017;
27. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
28. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
29. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Kunjungan Nasabah formulir 4/V-1/2 tanggal Maret 2017;
30. Asli 3 (tiga) lembar Hasil Kunjungan Nasabah formulir 2A/IV An SARIANA;
31. Asli Neraca dan Laporan L/R SARIANA;
32. Foto copy Surat Keterangan usaha Nomor: 503/123/RS-SM/2017 tanggal 09 Februari 2017;
33. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib pajak An SARIANA;
34. Foto copy Kartu Keluarga No. 9271051510150010 tanggal 26 Januari 2017;
35. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 078/04/XI/1998;
36. Foto copy Pemeriksaan Obyek Pendaftaran Tanah;
37. Foto copy Sertipikat Hak Milik Bo. 350 Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
38. Foto copy 4 (empat) lembar print Buku Tabungan BRI Britama;
39. Foto copy 22 (dua puluh dua) lembar Nota;
58. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An ZUKRI IRAWAN yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 110 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn;
 2. Asli Sertipikat Hak Tanggung Nomor: 460/2017 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 3. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) KUR BRI An. ZUKRI IRAWAN Rek. No. 0310.01.010790.10.1,

Hal. 143 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rek. ZUKRI IRAWAN tanggal 27 Mar 2017 Jumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Asli Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : 57/ADK/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;
5. Asli Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002;
7. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO);
8. Asli 2 (dua) Informasi Debitur BRI tanggal cetak 3/20/2017;
9. Screenshot gambar Inquiry DHN Uker Nama Zukri Irawan;
10. 2 (dua) lembar Informasi Debitur An. Zukri Irawan yang dicetak oleh BRI tanggal 08-03-2017;
11. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat oleh Zukri Irawan selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
12. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Zukri Irawan yang dicetak tanggal 27/03/2017;
13. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, tanggal 21-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp.128.800.000,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kredit;
14. Asli 1 (satu) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Notaris Retna dari Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setor/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 22-03-2017 oleh Zukri Irawan sebesar Rp.180.800.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kredit;
16. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 23-03-2017, kirim kepada: Zukri Irawan sebesar Rp.99.077.418,63 (sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah koma enam puluh tiga sen);

Hal. 144 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Asli Nota Dinas tanggal 27 Maret 2017 dari *Account Officer*, Jansen Aldrin Sahentumbage kepada Bapak Pimpinan Cabang BRI Sorong beserta lampiran;
18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 22 Maret 2017 sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima dari Zukri Irawan untuk pembayaran APMK, APHT, Proses, PNBP;
19. Covernote Nomor: 5733/NOT/III/2017, tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
20. Surat Pengantar Nomor B.881/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 12 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Makbul (Pinca) dan Sahat Marpaung (Pgs S P B);
21. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering latter) Nomor: B.880/KC-XVIII/ADK/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
22. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangani oleh Zukri Irawan;
23. Foto copy 1 (satu) lembar bukti Pelunasan Pinjaman dari Zukri Irawan Kepada Zukri Irawan Uraian OB Pelunasan Kredit YBS sebesar Rp.17.763.284,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tanggal 21-03-2017;
24. Asli Surat Nomor: R.12.BR.SPS/148/2017 tanggal 24 Maret 2017 Perihal Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Sarintan Widya L.S selaku Pjs.Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Sorong Pasar Sentral beserta lampiran;
25. Asli Surat Pelunasan Pembiayaan dari An. Zukri Irawan tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sorong;
26. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Zukri Irawan yang ditandatangani oleh Sahat Marpaung selaku Pjs SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 20/03/2017;
27. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat usah dan agunan bidang tanah;

Hal. 145 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit tanggal 17 Maret 2017 dari Zukri Irawan kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
29. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Zukri Irawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 03/2017 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Reno Adrian Zainal;
30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri S selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi;
33. Asli 12 (dua belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.66/KC-XVIII/BAL/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 An. Pemohon Zukri Irawa yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Reno Adrian Zainal selaku Pejabat Pemutus;
34. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
35. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Zukri Irawan;
36. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 3208/Makbusun, tanggal ... Maret 2019 atas nama Zukri Irawan yang di paraf dan ditandatangani oleh Reno Adrian selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Zukri Irawan selaku pemilik jaminan;

Hal. 146 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Zukri Irawan;
38. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Perhitungan R/L toko sembako Zukri Irawan Komp. BTN km. 9.5 yang ditandatangani oleh Zukri Irawan;
39. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271063006160002 An. Kepala Keluarga Zukri Irawan yang dikeluarkan pada tanggal 13-12-2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
40. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Zukri Irawan NIK. 9271061203790002 dan NPWP: 76.737.678.3-951.000 An. Zukri Irawan;
41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor: 517/14/KLDF/II/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;
42. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
43. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Zukri Irawan Nomor: 474/5794/DUKCAPIL/2017 dikeluarkan di Sorong pada tanggal 24-03-2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
44. Asli 1 (satu) Lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Sorong Nomor: B.75/KC/XVIII/ADK/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 Perihal Surat Peringatan I/Somasi I kepada Zukri Irawan yang ditandatangani oleh Makbul Selaku Pimpinan Cabang dan Rahmat Irjayadi selaku SPV.ADK;
45. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Zukri Irawan Nomor: 517/14/KLDF/II/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Kladufu Kepala Seksi perekonomian dan Pembangunan;

Hal. 147 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
47. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3208 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Kabupaten Sorong;
48. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
49. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 9201070403620002 An. Marthen Rumbiak;
50. Covernote Nomor: 5427/NOT/II/2017, tanggal 20 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
51. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah Zukri Irawan Nomor: 474.2/37/SM-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Kelurahan Remu Selatan Sekretaris Ub. Kasie Perekonomian dan Pembangunan;
52. Foto copy 114 (seratus empat belas) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama ZUKRI IRAWAN;
59. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An MURNI HJ yang terdiri atas:
 1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 140 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Nona Murni selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;
 2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn, antara Nona Murni selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;
 3. Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;

Hal. 148 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



5. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Sorong;
6. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
7. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2154/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Sorong;
8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
9. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2153/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Nn. Murni Hj untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBP;
11. Asli Covernote Nomor: 6346/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
12. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Murni Hj yang ditandatangani oleh Rahmat Irjayadi selaku SPB dan Elfira Worotitjan selaku Pet.ADK tanggal 25/08/2017;
13. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor: 261/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
14. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Murni Hj selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;

Hal. 149 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangani oleh Murni Hj;
16. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Murni Hj yang dicetak tanggal 30/08/2017;
17. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. MURNI HJ Rek. No. 0310.01.011142.10.7, Nama Rek. MURNI HJ tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
18. Asli 2 (dua) lembar (BRI Checking: TOP 5 Hasil Pencairan) yang dicetak tanggal 25/08/2017, An. Murni Hj;
19. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Inquiry DHN Uker Nama Murni HJ;
20. 3 (tiga) lembar Screenshot gambar Sisten Informasi Debitur Murni HJ;
21. 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Informasi Debitur Murni HJ;
22. 1 (satu) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking Murni HJ;
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Murni Hj kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;
24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Murni HJ dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal /08/2017 yang ditandatangani oleh Murni HJ, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Toko Sembako Murni Pasar Sentral Belakang Pondok Sageri yang ditandatangani oleh Murni;
26. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Toko Sembako Murni;
27. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 026/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Murni HJ yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin

Hal. 150 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sahuntumbage selaku Penilai (*Account Officer*) serta Murni. HJ selaku pemilik jaminan;
28. Asli 2 (dua) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 29. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Murni HJ;
 30. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP : B.350/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Murni HJ yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
 31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Murni HJ;
 32. Asli 1 (satu) lembar foto dokumentasi Lokasi agunan yakni bidang tanah milik Murni HJ;
 33. Covernote Nomor: 6284/NOT/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 34. Covernote Nomor: 6254/NOT/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
 35. Asli Akta Jual Beli No. 868/2017 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017 antara Tuan Nasri Nonci selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Nona Murni HJ selaku Pembeli (Pihak Kedua);
 36. Asli 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar Nota Penjualan, Faktur Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Murni HJ;
 37. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
 38. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP: 81.851.488.7-951.000 An. Murni HJ;
 39. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;

Hal. 151 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271052609080006 An. Kepala Keluarga H.M. Jufri yang dikeluarkan pada tanggal 27-09-2008 dan ditandatangani oleh Kakandukcapil;
 41. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Murni HJ Nomor : 503/220/RS-SM/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 25 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Remu Selatan;
 42. Foto Dokumentasi tempat usaha Murni HJ selaku Pemohon Kredit;
 43. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Murni HJ NIK. 9271025904900001;
 44. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Murni yang dicetak tanggal 12-5-2017;
 45. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian terletak di kecamatan mayumuk, desa klain (SP.1) dengan luas 10.000m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Murni HJ kepada Nasri Nonci yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2014;
 46. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 626 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
 47. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) checkliss kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa di tandatangani oleh petugas yakni Elfira Warotitjan.
60. Asli 1 (satu) bundel Berkas Pemberian Pinjaman (I) An IS LAKAJI yang terdiri atas:
1. Asli Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 138 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Tuan Makbul selaku Bank atau Pihak Pertama dan Is Lakaji selaku Pengambil Kredit atau Pihak Kedua;
 2. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 139 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn, antara Is Lakaji selaku Pemberi Kuasa dan Tuan Makbul selaku Penerima Kuasa;

Hal. 152 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
4. Asli 2 (dua) lembar Instruksi Pencairan Kredit Modal Kerja KUR Nomor : 262/ADK/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
5. Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Islakaji Herma Wati selaku pemberi kuasa kepada Makbul selaku penerima kuasa;
6. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Notaris/PPAT Retna Purbawati tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Is Lakaji & Ny. Herma Wati untuk pembayaran APMKT, SKMNT, APHT, Proses, PNBP;
7. Asli Covernote Nomor : 6345/NOT/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
8. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;
9. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn Notaris di Sorong;
10. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B...../KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani diatas meterai;
11. Asli Surat Pengantar Nomor: B.2156/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorong Kepada Retna Purbawati, S.H., S.E., M.Kn Notaris di Sorong;
12. Asli 5 (lima) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (offering letter) Nomor: B. 2155/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditandatangani tanpa meterai;

Hal. 153 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor: R12.SBZ/251/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Is Lakaji perihal Pelunasan Fasilitas Kredit atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Tabah Triyoga selaku Branch Manager;
14. Asli Surat BNI Nomor: SOR/7/0895 tanggal 30 Agustus 2017 ditujukan kepada Bpk Is Lakaji perihal Keterangan Lunas Kredit yang ditandatangani oleh Yeska Friadi selaku Pimpinan;
15. Asli 2 (dua) lembar Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket An. Is Lakaji yang ditandatangani oleh Rahmat Iriyadi selaku SPB dan Elfira selaku ADK tanggal 25/08/2017;
16. Asli 3 (tiga) lembar Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di tandatangi oleh Is Lakaji dan Herma Wati;
17. 2 (dua) lembar Detail Monitoring Debitur Is Lakaji yang dicetak tanggal 30/08/2017;
18. Asli 2 (dua) lembar Tanda Setoran Nama Titipan Lainnya tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
19. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK-KUR) BRI An. IS LAKAJI Rek. No. 0310.01.056926.50.8, Nama Rek. IS LAKAJI tanggal 30 Aug 2017 Jumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
20. Asli Formulir Review Dokumen (untuk pengecekan kelengkapan berkas) checkliss kelengkapan dokumen pada berkas yang diusulkan, yang dilakukan ADK tanpa di tandatangi oleh petugas yakni Elfira Warotitjan;
21. Asli 1 (satu) lembar Advis debet tanggal 24-08-2017, kirim kepada: Is Lakaji sebesar Rp.11.014.320.76,00 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
22. *Loan Payoff Quotation* Nama Nasabah IS LAKAJI sebesar Rp.11.014.320.76,00 (sebelas juta empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Rakyat tanggal 01 Agustus 2017 dari Is Lakaji kepada Bapak Pimpinan Cabang PT, Bank Rakyat Indonesia di Sorong;

Hal. 154 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 4 (empat) lembar Surat Keterangan Permohonan Pinjam Is Lakaji dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kanca Sorong tanggal / 08/2017 yang ditandatangani oleh Is Lakaji, Jansen Aldrin Sahentumbage dan Adetya Boogie Sejati;
25. Asli 13 (tiga belas) lembar Memorandum Analisa Dan Putusan Kredit Non Rating No. SKPP: B.349/KC-XVIII/ADK/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Is Lakaji yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;
26. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat yang ditandatangani oleh Is Lakaji;
27. Asli 1 (satu) lembar Perhitungan Kebutuhan Kredit Menggunakan Metode RPC yang yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong terhadap Is Lakaji;
28. Asli 2 (dua) lembar foto dokumentasi tempat agunan yakni bidang tanah milik Is Lakaji;
29. Asli 4 (empat) lembar Formulir Model 78-a (Untuk Tanah Yang Tidak Ada Bangunannya) SHM No. 025/Klain, tanggal ... Agustus 2019 atas nama Is Lakaji yang ditandatangani oleh Adetya Boogie Sejati selaku manager Pemasaran dan Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Penilai (Account Officer) serta Is Lakaji dan Harma Wati selaku pemilik jaminan;
30. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
31. Asli 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat BRI yang mengunjungi Jansen Aldri Sahentumbage selanjutnya Nasabah/pemohon yang dikunjungi Is Lakaji;
32. Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil: Sorong/Jayapura, Hasil Kunjungan Nasabah Is Lakaji;
33. Asli 1 (satu) lembar Neraca dan Laporan R/L Is Lakaji Jl F Kalasuat;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor : 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal

Hal. 155 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;
35. Covernote Nomor: 6086/NOT/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
36. Covernote Nomor: 6285/NOT/VI/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Retna Purbawati selaku Notaris/PPAT;
37. Foto copy 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan, Faktu Penjualan yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Kredit atas nama Is Lakaji;
38. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Is Lakaji Nomor : 503/76/MLN-SU/2017, yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 11 April 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Trantib Kelurahan Mala Nu;
39. Foto Dokumentasi tempat usaha Is Lakaji selaku Pemohon Kredit;
40. Asli kwitansi Pembayaran sebidang tanah pertanian yang terletak di kecamatan mayumuk Kabupaten Sorong, dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan harga Rp.196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dari Is Lakaji kepada Badriah H.S yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2014;
41. Foto copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor: 625 beserta lampiran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong;
42. Foto copy Akta Jual Beli No. 756/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Retna Purbawati selaku PPAT selanjutnya Nyonya Badriah H.S selaku Penjual (pihak pertama) dengan Tuan Is Lakaji selaku Pembeli (pihak kedua);
43. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002 dan Is Lakaji NIK. 9271050606860006;
44. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Hermawati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
45. Asli 1 (satu) lembar Formulir Pencarian Debitur An. Herma Wati yang dicetak tanggal 12-5-2017;
46. Asli 3 (tiga) lembar Informasi Debitur (STORY PO) debitur Is Lakaji tanggal cetak 12/05/2017;
47. 4 (empat) lembar Screenshot gambar Daftar Pencarian BRI Checking nasabah Is Lakaji dan Herma Wati;

Hal. 156 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



48. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9271051803110002 An. Kepala Keluarga Is Lakaji yang dikeluarkan pada tanggal 22-11-2016 dan ditandatangani oleh Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
49. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 169,015,IV,2010 hari Rabu Tanggal 31 Maret 2010 antara Iswadi Lakaji dengan Rismawati;
50. Foto copy 1 (satu) lembar NPWP: 75.871.792.0-951.000 An. Is Lakaji;
51. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Herma Wati NIK. 9271055411850002;
52. Foto copy 1 (satu) lembar KTP An. Is Lakaji NIK. 9271050606860006;
61. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur JAINUDDIN;
62. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MURNI HJ;
63. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur RISMAN R;
64. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ZUKRI IRAWAN;
65. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur LOUAY DASSALAM;
66. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR;
67. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur ARIF;
68. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA;
69. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur IS LAKAJI (pihak yang dikunjungi SARIANA);
70. Asli Laporan Kunjungan Nasabah BRI Kanca Sorong atas nama Debitur SARIANA (pihak yang dikunjungi RUSTAM);
71. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama H. ZUKRI IRAWAN;
72. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama FAISAL. S;
73. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama MUH YUSUF ZUBAIR;
74. Asli Surat Pernyataan (tuliskan tangan) atas nama SARIANA;

Hal. 157 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli catatan pengeluaran uang MUHAMMAD YUSUF ZUBAIR tulisan tangan ZUKRI IRAWAN

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami JHON PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr. PETRUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 28 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH.,MH

JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,MH.

Dr. PETRUS MATURBONGS, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal. 158 dari 159 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)